RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 14, 21 DAN 22 APRIL 2015

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG PERIODE 2010 - 2015

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

Hari : SELASA
Tanggal : 14 April 2014
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. MAJID KAMIL MZ**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 30 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 15 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat	Plt. Bupati Rembang
Yang sayahormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Para Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2015 kita semua dapat bertemu menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Rembangdengan keadaan sehat wal-afiat.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang pada tanggal 7 April 2015, yang menjadi agenda pokok dalam Rapat Paripurna hari ini adalah Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang oleh Bupati Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum masuk kepada acara pokok, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini :

Yang pertama , kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan selamat kepada Sdr. H. Abdul Hafidz yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati dan Plt. Bupati Rembang, pada tanggal 6 April 2015 bertempat di ibukota provinsi Jawa Tengah telah resmi dilantik menjadi Bupati definitif Kabupaten Rembang periode 2010-2015, danselamat menjalankan tugas memimpin pemerintahan di Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Yang kedua, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembangmemberikan apresiasi yang sebesarnya -besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang dengan tepat waktu telah menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ AMJ Bupati Rembang Periode 2010-2015

kepada DPRD Kabupaten Rembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang ini merupakan implementasi dari : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan :

(1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1

(satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Atas dasar ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui SuratSekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 130.04/0567/2015 tanggal 20 Maret 2015, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2014dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang secara bersamaan kepada DPRD Kabupaten Rembang.

Selanjutnya pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

(1) LKPJ disampaikan oleh kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD.
(2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
(3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hari setelah LKPJ diterima.
(5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.
(6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum kita lanjutkan acara Rapat Paripurna ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan,
2. Penyampaian LKPJAkhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;
3. Penutup.

Berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 80 ayat (1) huruf c, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11.20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta rapat dan hadirin yang terhormat,

Mari kita masuki acara yang kedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang, yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Rembang .
Untuk itu kepada Saudara H. ABDUL HAFIDZ dipersilahkan.

====PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR TA 2014 dan LKPJ AMJ BUPATI REMBANG====

- ***(Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ AMJ Buapti Rembang terlampir)***

Terimakasih Saudara Bupati Rembang atas penyampaiannya.

Selanjutnya LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan ini nantinya akan dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang kemudian hasilnya akan disampaikan oleh masing-masing komisi dalam Rapat Paripurna Internal DPRD pada hari Selasa tanggal 21 April 2015.Untuk itu saya berharap kepada rekan-rekan anggota Komisi agar lebih jeli dan teliti dalam membahasLKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang. Hasil Pembahasan dan Rekomendasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam **Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang,** yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa pada tanggal 22 April 2015 sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Tanpa terasa agenda dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan kita laksanakan dengan baik, maka selesai sudah Rapat Paripurna pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat. Dengan mengucap "**Alhamdulillaahirobbil 'alamin** " tepat pukul 12.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA	SEKRETARIS
H. MAJID KAMIL MZ	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ AHKIR TAHUN ANGGARAN 2014
DAN LKPJ AHKIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG
HARI/TANGGAL : SELASA, 14 APRIL 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMKO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH. MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA,

H. MASHID KAMIL MZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ AHKIR TAHUN ANGGARAN 2014
DAN LKPJ AHKIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : SELASA , 14 APRIL 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1.
2	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	2.
3	Bambang Sucipto	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	.....	Dandim 0720 Rembang	4.
5	yayan Syarif H.	Kepolisian Resort Rembang	5.
6	ILHAM SUHROWARDI	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ AHKIR TAHUN ANGGARAN 2014
DAN LKPJ AHKIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : SELASA , 14 APRIL 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Hoor Efendi	STAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Wartono	-"-	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. JAWARI		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Ikhsanudin	Kabag	8
9	BAG. HUKUM	Edy Nyoto P	Kabag	9
10	BAG. HUMAS	Drs. Agus Sri	Kabag. Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Sucharto	—	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sukandar	Kabag Perekonomian	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Hartono	—	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Eny Suharwati	ORPEG	15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD	Mus Rini	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	Djoko P	Sekretaris	18
19	BAPPEDA	Hari S	Ka	19
20	BPMPKB	Slamet Bondi	Kasubdag Kin	20
21	B K D	Supartini		21
22	BKP & P4K	Dwi Purwanto	Ka BADAN	22
23	B P B D	Sutarsih	Kabid	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Trupto Ino	Sekd	24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN	Wiwaryuk	PLT Sekdin Kabid PMP	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Ka. Sukiadi	Sekretaris	27
28	DINTANHUT	Surasmin		28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sek. Din - Lutkan	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	Suyono	Ka Dinas	30
31	DINAS DUKCAPIL	M. Gozali	Sekdin	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryosa	Sekdin	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rustiyanto	Sek.	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Didik S		36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi W.	Ka Perpustakaan	37
38	KANTOR PPT	Ety Purbiyanti	Ka. Sub-Bag TU	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y.E. Sudjatmiko	Ka Sub TU RSD	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	MASRI SUKAMTO		41
42	P D A M	Gunawan H		42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Tinus Dan	Kasie	45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J	Hanik Andi cha	RSJ	48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	ATHO'ILLAH.		50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	SAICHUDIN	Ka BPS	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Ismanto	Ka. Humas	54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG	Tri Wiranto	Ka BPN	61
62	KANTOR PAJAK	Kurnia A.	Kepala	62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Sulistiwo	Sek KPU	66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	Rini Rochiwati. Lasmiatun	Sekretaris Bendahara	71
72	GERAKAN PRAMUKA	WARTONO	SEKRETARIS	72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT	SOEHARNO	Wk SEKR.	76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM	Sukijo Kusnan.		81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	F. JUHANTO / BRI	F. OVMANTO	Pinca.	96
97	Bag. Tapa	Henny Shafa	Kab PUM	97
98	bag Humas	A. Agung PR		98
99	Agus TRI S	Int Dran		99
100	Suyono	Dahlubhoninto	—	100
101	Mitra.	RRI. Semarang	Wartawan	101
102	MIMBAR RAKYAT	MAJALAH	WARTAWAN	102
103				103
104				104
105				105

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LKPJ AHKIR TAHUN ANGGARAN 2014

DAN LKPJ AHKIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : SELASA , 14 APRIL 2015

PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	.....	1
2	CAMAT KALIORI	.....	2
3	CAMAT SUMBER	.....	3
4	CAMAT SULANG	.....	4
5	CAMAT BULU	.....	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM	.....	7
8	CAMAT SALE	SUBHAN	8
9	CAMAT LASEM	.....	9
10	CAMAT PANCUR	.....	10
11	CAMAT SEDAN	.....	11
12	CAMAT SLUKE	HM. Mardiyanto	12
13	CAMAT KRAGAN	.....	13
14	CAMAT SARANG	.....	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2014 & Akhir Masa Jabatan
Bupati Rembang

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG PERIODE 2010 - 2015

KEPADA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
- Para Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Rembang dan Ketua Pengadilan Agama Rembang,
- Tamu undangan yang Saya hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran Eksekutif yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2014 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Rembang Periode 2010 - 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, perkenankan Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kabupaten Rembang, atas segala dukungan serta jalinan komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan Bupati / Wakil Bupati Tahun 2010-2015. Demikian pula kepada para pimpinan partai politik, seluruh aparat pemerintah daerah serta segenap pemangku kepentingan yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan agenda pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015.

Secara khusus, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Rembang atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati merupakan amanat konstitusional yang wajib dijalankan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dimana pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Berkenaan dengan akhir masa jabatan Bupati Rembang periode 2010-2015, penyampaian LKPJ AMJ Bupati Rembang ini juga mencakup penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2015.

Untuk memberikan informasi secara menyeluruh, maka materi penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam agenda sidang parpurna saat ini telah disusun dalam format kompilasi yang meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 sekaligus LKPJ Akhir Masa Jabatan Periode 2010 - 2015.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan tahun 2010-2015 ini merupakan momentum dan sarana penting untuk memberikan informasi yang obyektif kepada masyarakat, terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diwujudkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Hasil capaian program dan kegiatan pembangunan menjadi bahan penting untuk evaluasi bersama, yang ditujukan agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai koridor perencanaan yaitu dengan merujuk pada Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Rembang telah secara konsisten melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk mendukung langkah percepatan pembangunan daerah. Kebijakan percepatan pembangunan daerah dititikberatkan pada empat pilar prioritas pembangunan daerah, yang mencakup program-program berikut : (1) Pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang representatif dan komprehensif, (2) Pendidikan gratis dan bermutu, (3) Kesehatan gratis dan berkualitas, serta (4) Pengembangan ekonomi Rembang. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, hasil implementasi empat pilar program prioritas ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat serta turut memberikan dampak positif bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Rembang.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan daerah pada tahun 2014 maupun selama periode 2010-2015 menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Tingkat pencapaian kinerja di berbagai sektor telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Rembang. Berbagai kemajuan yang berhasil diraih, dapat diukur melalui capaian sejumlah indikator pembangunan yang merupakan standar pelayanan minimal di berbagai urusan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Saya akan menyampaikan gambaran singkat perkembangan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rembang yang meliputi empat aspek berikut :

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DI KABUPATEN REMBANG

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai 5,03 % selama kurun waktu 5 tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan rata-rata 0,14% per tahun.
- angka inflasi dapat terkendali pada kisaran angka di bawah dua digit yaitu 7,59%. Dengan demikian selama lima tahun terakhir angka inflasi dapat dikendalikan rata-rata hanya 5,65% per tahun yang menunjukkan tingkat kestabilan harga barang dan jasa relatif terjaga.
- PDRB Perkapita sebesar Rp. 4.313.455,- sehingga selama kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi kenaikan trend pendapatan perkapita dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun



- Indeks gini rasio sebesar 0,32 berarti distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Rembang relatif merata. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata indeks gini ratio masih berada dibawah 0,35 yang dapat dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.

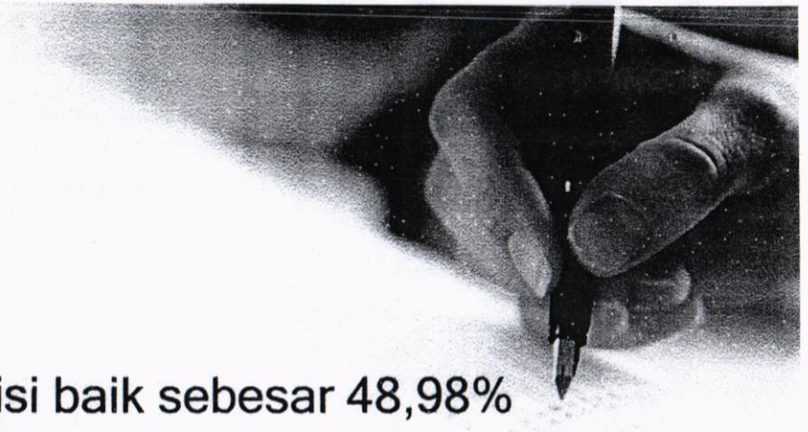
- Perbaikan perbaikan kesejahteraan sosial secara agregat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan menjadi sebesar 73,53 sehingga dalam kurun waktu lima 5 terakhir rata-rata capaian IPM setiap tahun sebesar 72,71 dengan komponen-komponen penyusunnya yang meliputi angka harapan hidup sebesar menjadi 70,64 dan angka melek huruf menjadi 92,07% serta rata-rata lama sekolah menjadi 7,3.

2. ASPEK PELAYANAN UMUM



- angka partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar yaitu SD/M sebesar 87,41 dan SMP/MTs sebesar 77,26 serta pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA sebesar 45,05. Secara akumulatif APM dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan trend peningkatan baik di tingkat pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah

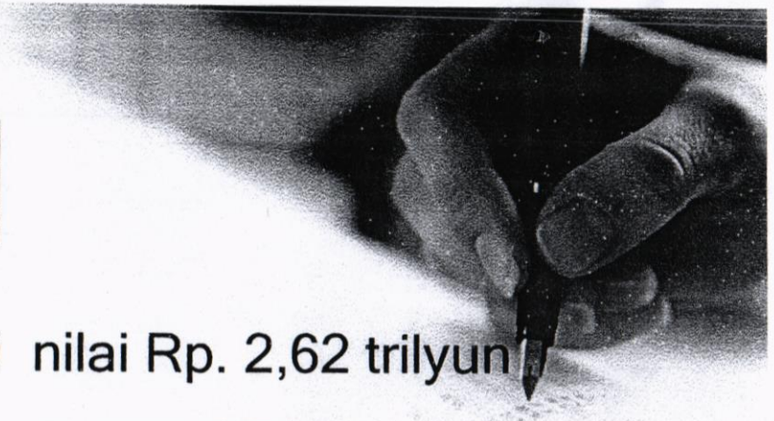
- cakupan desa imunisasi anak (UCI) mencapai 100 %, cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin berupa kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata 1 mencapai 54,87% , sedangkan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 94,31%, Selama lima tahun terakhir indikator-indikator bidang kesehatan tersebut menunjukkan trend peningkatan setiap tahun



- proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 48,98% atau 314,83 km dari total jalan sepanjang 642,75 km
- proporsi daerah irigasi baik mencapai 92,30 % atau seluas 19.561,45 hektar dari total daerah irigasi seluas 21.193,45 hektar
- proporsi rumah layak huni sebesar 64,06 %
- proporsi rumah tangga pengguna air bersih sebesar 61,33 % dari total rumah tangga

Dalam kurun lima tahun terakhir indikator capaian bidang pekerjaan umum dan perumahan menunjukkan trend peningkatan.

3. ASPEK DAYA SAING DAERAH



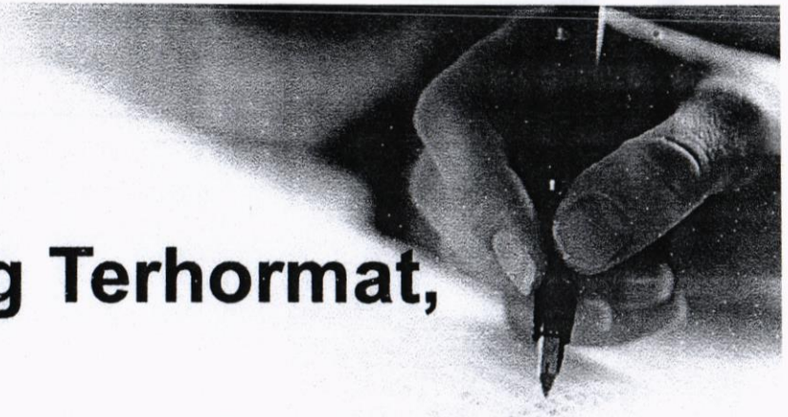
- PDRB hingga tahun terakhir mencapai nilai Rp. 2,62 trilyun
- Dalam kurun waktu 5 tahun, perubahan struktur PDRB terbesar terjadi pada sektor perdagangan hotel dan restoran.
- Keberhasilan pembangunan sektor pertanian sebagai kontributor ekonomi terbesar yang dapat diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) tahun terakhir telah mencapai angka 105,12 yang mencerminkan indeks kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan usaha taninya

Kondisi daya saing daerah juga ditunjang iklim investasi yang semakin kondusif dengan perbaikan pelayanan perijinan usaha serta relatif terkendalinya gangguan keamanan sehingga mampu memberikan jaminan dan kepastian investasi di Kabupaten Rembang.



4. ASPEK KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir situasi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif kondusif sebagai cerminan karakter masyarakat Rembang yang penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Indikator keamanan dan ketertiban dapat kita rasakan pada situasi dan kondisi wilayah yang tetap terjaga, aman dan tenteram untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keberlanjutan pembangunan serta kehidupan berdemokrasi yang damai.



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Perkembangan indikator capaian penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rembang yang Saya sampaikan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kemajuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir .

Untuk itu perkenankanlah Saya menyampaikan secara lebih utuh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2014 serta Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Periode 2010 - 2015 dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan wajib dan pilihan sebagai berikut :

BIDANG PENDIDIKAN





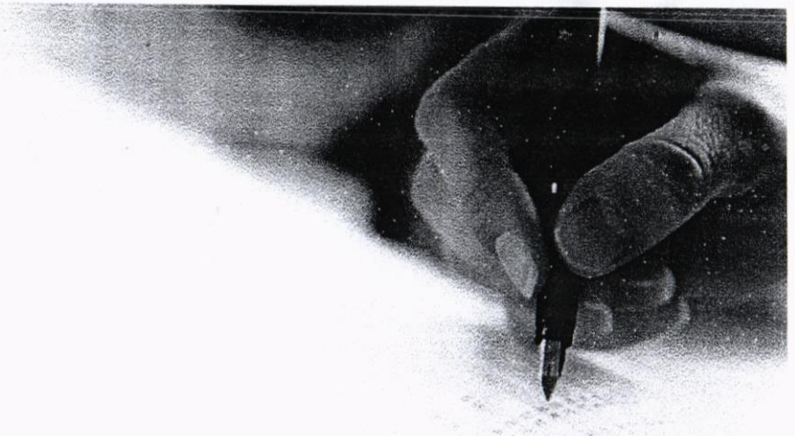


Indikator Kinerja Tahun 2014

1. ANGKA MELEK HURUF mencapai 97,80 %

2. ANGKA KELULUSAN
   - SD/MI mencapai 99,22 %
   - SMP/MTs mencapai 99,38 %
   - SMA/SMK/MA mencapai 96,76 %

3. ANGKA MELANJUTKAN
   - SD/MI ke SMP/MTs mencapai 103,66 %
   - SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 90,03 %



4. ANGKA PUTUS SEKOLAH
   - SD/MI mencapai 0,01 %
   - SMP/MTs mencapai 0,16 %
   - SMA/SMK/MA mencapai 0,29 %

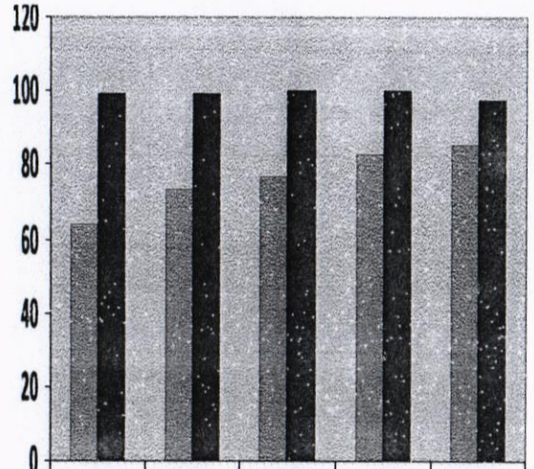
5. ANGKA PARTISIPASI KASAR
   - SD/MI/Paket A sebesar 101,28 %
   - SMP/MTs/Paket B sebesar 101,12 %
   - SMA/SMK/MA/ Paket C sebesar 73,31 %

6. ANGKA PARTISIPASI MURNI
   - SD/MI/Paket A sebesar 87,41 %
   - SMP/MTs/Paket B sebesar 77,26 %
   - SMA/SMK/MA/ Paket C sebesar 45,05 %

7. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 87,12 %

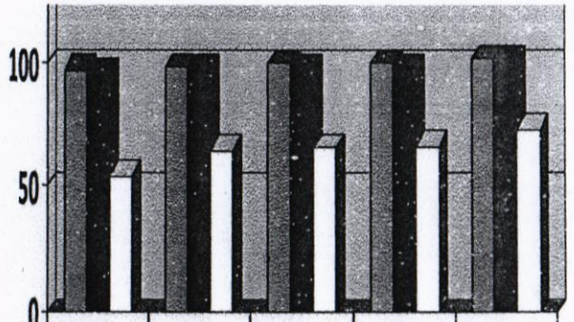
Penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, terlihat kecenderungan perbaikan yaitu meningkatnya upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola pelaksanaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan sebagaimana ditunjukan pada capaian hasil kinerja pembangunan bidang pendidikan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada grafik berikut ini :

Grafik : PAUD dan penduduk usia > 15 tahun melek huruf



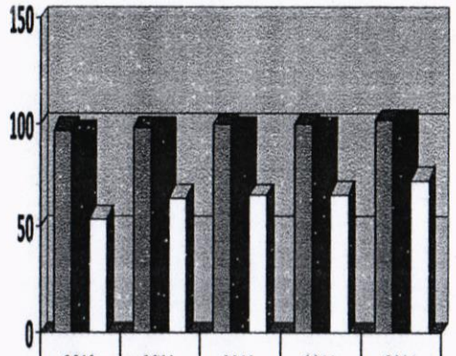
	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
PAUD	63.96	73.04	77.07	82.95	85.08
usia >15 th melek huruf	99.42	99.67	99.72	99.97	97.8

Grafik : Angka Partisipasi Kasar Tahun 2010-2014



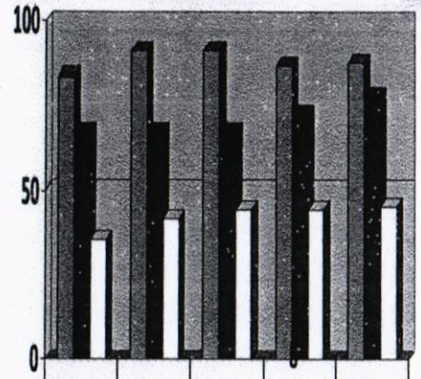
	2010	2011	2012	2014	2014
SD/MI/Paket A	96.86	98.1	99.5	99.68	101.28
SMP/MTs/Paket B	95.53	96.91	96.98	96.99	101.12
SMA/MA/SMK/Paket C	54.52	64.92	65.86	66.62	73.31

Grafik : Angka Partisipasi Kasar Th 2010-2014



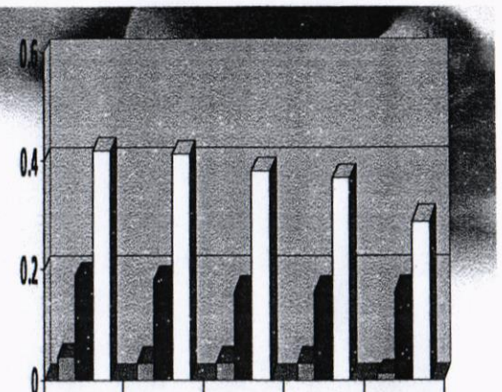
	2010	2011	2012	2014	2014
SD/MI/Paket A	96.86	98.1	99.5	99.68	101.28
SMP/MTs/Paket B	95.53	96.91	96.98	96.99	101.12
SMA/MA/SMK/Paket C	54.52	64.92	65.86	66.62	73.31

Grafik : Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010-2014



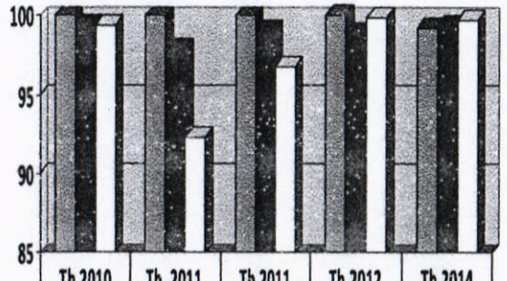
	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
SD/MI/Paket A	83.49	90.75	90.97	86.39	87.41
SMP/MTs/Paket B	66.76	66.91	67.06	72.2	77.26
SMA/MA/SMK/Paket C	35.51	41.42	44.44	44.3	45.05

Grafik : Angka Putus Sekolah Tahun 2010-2014



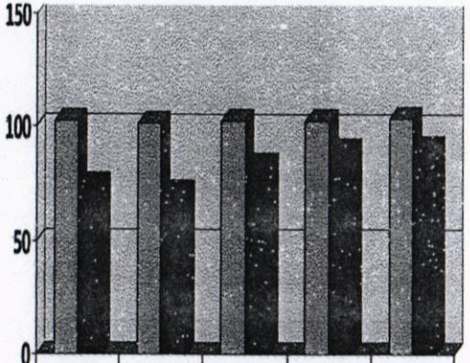
	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
SD/MI	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01
SMP/MTs	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16
SMA/MA/SMK	0.42	0.41	0.38	0.37	0.29

Grafik : Angka Kelulusan tahun 2010-2014



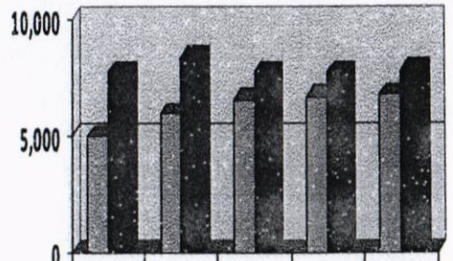
	Th 2010	Th. 2011	Th 2011	Th 2012	Th 2014
SD/MI	99.99	99.99	99.99	100	99.22
SMP/MTs	99.5	97.96	99.02	99.01	99.38
SMA/MA/SMK	99.36	92.31	96.77	99.88	99.76

Gafik : Angka Melanjutkan Th 2010-2014



	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
SD/MI	102.06	101.39	102.81	102.55	103.66
SMP/MTs	74.02	71.2	82.84	89.02	90.03

Grafik : Guru dg kualifikasi SI/DIV Tahun 2010-2014



	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
Jumlah Guru berijazah S1/DIV	4,920	5,894	6,557	6,628	6,733
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMK/MA/SMK	7,683	8,343	7,696	7,701	7,728

BIDANG KESEHATAN



Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai sebesar 100% atau sudah terlayani, prosentase capaian yang sama dengan tahun sebelumnya.
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai sebesar 94,31% atau naik 0,02%.
3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai sebesar 100% atau naik 0,004%.
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai sebesar 100% atau sudah mendapatkan perawatan semua balita gizi buruk.
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai sebesar 66,4% atau naik 0,11%.
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai sebesar 100% atau sudah ditangani semua penemuan penderita DBD.
7. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin berupa kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata 1 mencapai sebesar 54,87% atau turun 11%.
8. Cakupan kunjungan bayi mencapai sebesar 94,59% atau naik 0,06%.



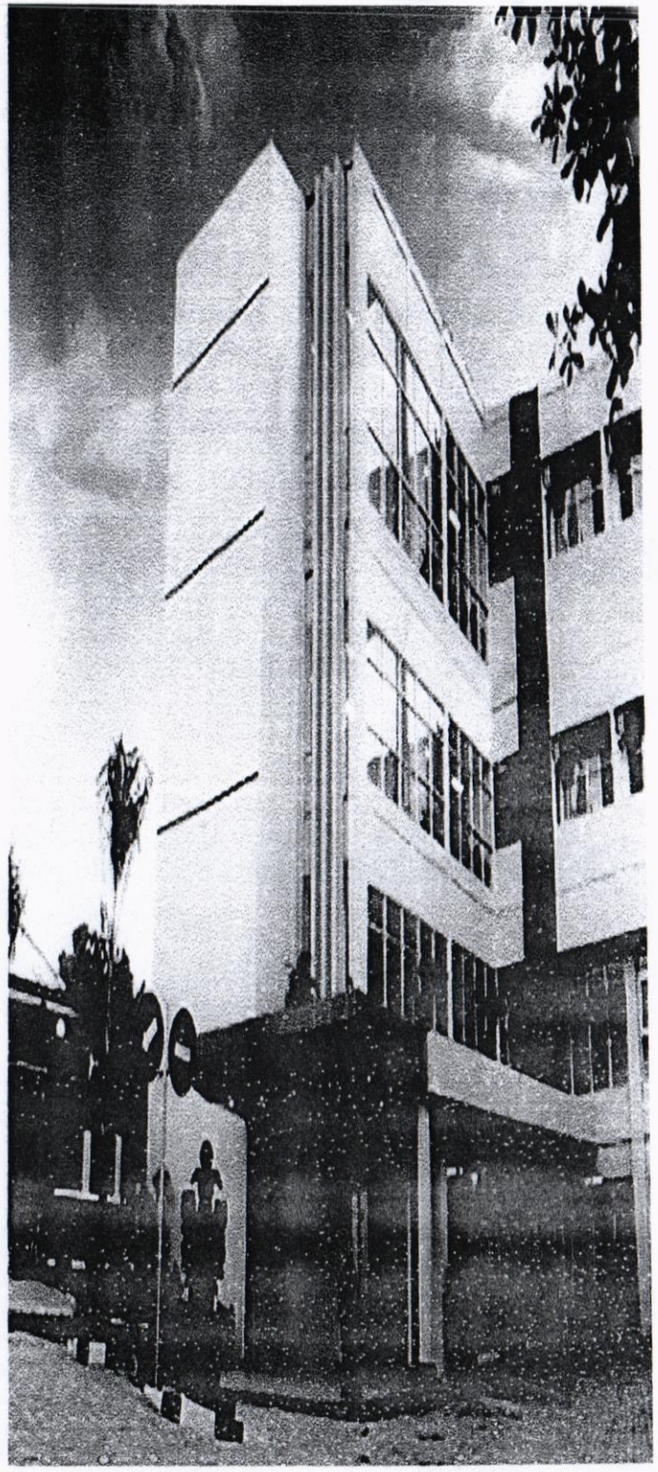


Adapun capaian kinerja mutu pelayanan rumah sakit tahun 2014 meliputi :

1. Angka keterlambatan pelayanan Pertama Gawat Darurat mencapai 0% atau semua pasien tidak terlambat mendapatkan pelayanan pertama gawat darurat.
2. Angka Pasien dengan Dekubitus mencapai 0,17%
3. Angka Kejadian Infeksi dengan Jarum Infus mencapai 6,4% (masih berada dibawah standar maksimal 7 %).
4. Angka Kematian Pasien Gawat Darurat mencapai 0,47% (masih berada dibawah standar maksimal 1%).
5. Angka Masa Tunggu Sebelum Operasi Elektif (AMSOE) mencapai 100% atau artinya tidak ada pasien operasi yang menunggu hingga 2 hari.
6. Infeksi Luka Operasi mencapai 0,41% atau turun dari tahun sebelumnya 0,59%.
7. Angka Sectio Caesarea mencapai 33,33% , sedangkan target maksimal 20%.
8. Angka Kematian Ibu Karena Perdarahan (AKIP) mencapai 0,05% atau masih dibawah standar maksimal 1 %.
9. Angka Kematian Pasien Rawat Inap Intensif (ICU) mencapai 1,84% atau turun 0,18% dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,46%..
10. Angka Kematian karena Eklamsia mencapai 0,62% dari target maksimal 5%.

Sedangkan capaian kinerja tingkat pemanfaatan sarana pelayanan rumah sakit tahun 2014 meliputi :

1. Rata-Rata Kunjungan Poliklinik Per Hari mencapai 235 kunjungan atau turun 0,07% dari kunjungan tahun sebelumnya.
2. Kebutuhan air minum dan air bersih rumah sakit mencapai 1.000.000 liter (sudah terlayani semua kebutuhan air bersih)
3. Prosentase item obat yg tersedia terhadap item obat dalam formularium mencapai 100%.
4. Rata-rata persalinan per hari mencapai 6 persalinan atau turun 0,14%.
5. Gizi (Prosentase Penyediaan Makanan Khusus) mencapai 100% atau sudah tercukupi penyediaan makanan khusus.
6. Radiologi (Prosentase Pemeriksaan dari Luar Rumah Sakit) mencapai 68% dari 25% kunjungan, yang artinya pemanfaatan radiologi oleh pihak luar masih dibawah standar minimal.
7. Angka Ketidak Lengkapan Pengisian Catatan Medis mencapai 43,46%.
8. Laboratorium (rata-rata jumlah pemeriksaan per hari) mencapai 1.057 pemeriksaan atau naik 0,01%.
9. Bank Darah (pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit) mencapai 100% yang berarti sudah tercukupi pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit.



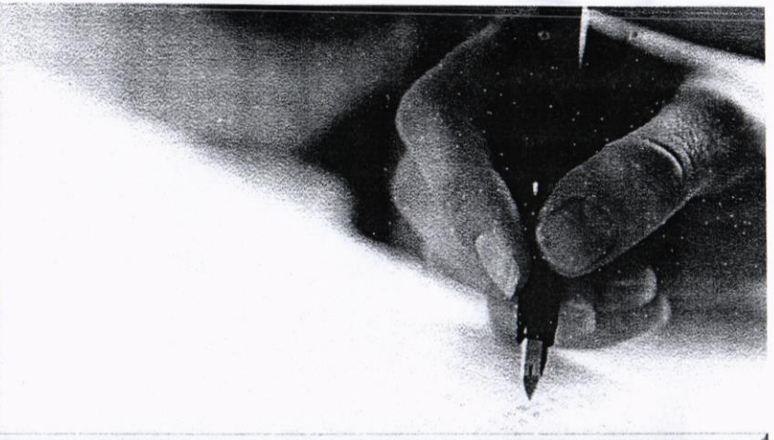
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat perbaikan kondisi kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya penduduk yang hidup dalam lingkungan dan perilaku yang bersih dan sehat, masyarakat mampu dan memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Perbaikan kondisi kesehatan masyarakat tersebut diantaranya dapat dilihat pada capaian hasil kinerja pembangunan bidang kesehatan :

- komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 100% atau terlayani semua
- pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai rata-rata sebesar 94,33%.
- Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai rata-rata sebesar 100% yang berarti semua balita gizi buruk mendapatkan perawatan
- Semua desa/kelurahan telah terjangkau imunisasi anak
- Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin mencapai rata-rata sebesar 66,73% atau naik 28,22% dari kondisi tahun 2010.
- Angka keterlambatan pelayanan Pertama Gawat Darurat mencapai rata-rata sebesar 0,09% yang artinya hampir semua pasien tidak terlambat mendapatkan pelayanan pertama dawat darurat







LINGKUNGAN HIDUP

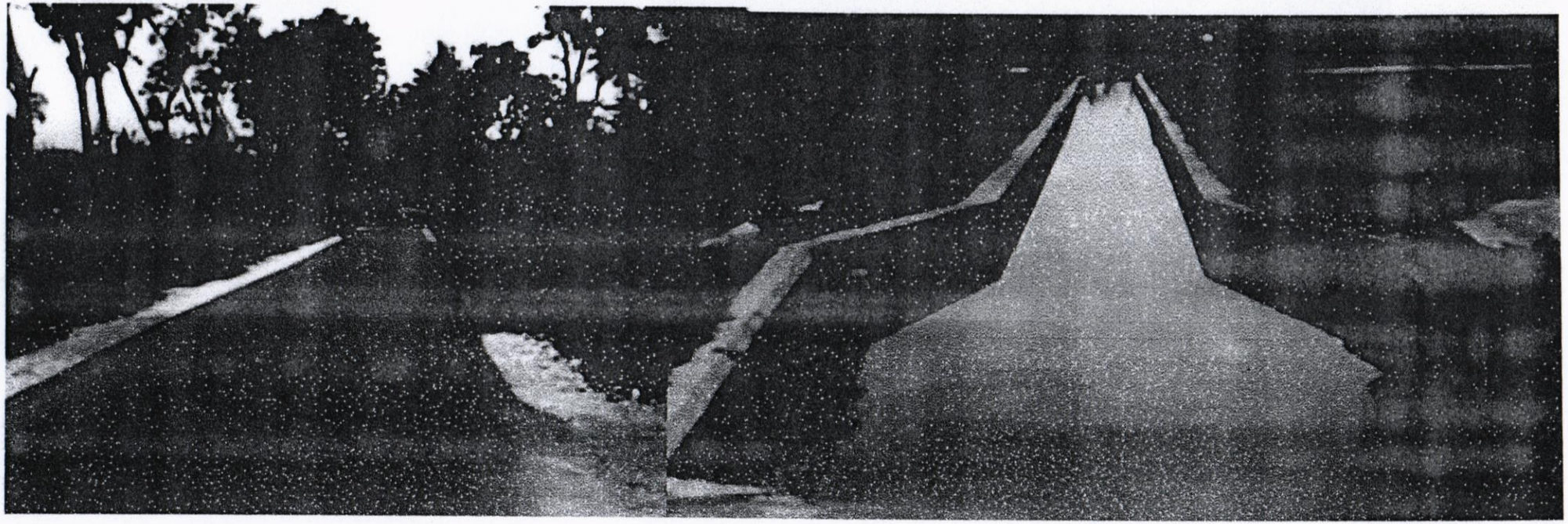
- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% dari jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL sebanyak 5 perusahaan
- Penegakan hukum lingkungan sebesar 100% dari jumlah kasus lingkungan yang ada 4 kasus
- Kebersihan pasar tradisional sebesar 91,6% yaitu proporsi jumlah pasar tradisional yang tergolong baik 11 dari jumlah pasar tradisional 12.
- Penanganan sampah sebesar 20,15% yaitu proporsi volume sampah yang ditangani 377,90 m3 dari volume produksi sampah 1.875,2 m3.
- Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 penduduk sebesar 0,25 yaitu proporsi jumlah daya tampung TPS 152 m3 dari jumlah penduduk 612.552 jiwa.

PEKERJAAN UMUM



Kondisi Jalan Kabupaten dan Irigasi Tahun 2010-2014

No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jalan kabupaten dlm kondisi baik (Km)	346,61	321,75	351,58	356,88	314,83
2	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	642,75	642,75	642,75	642,75	642,75
3	Luas Irigasi Kabupaten baik (m2)	13662	15.640	19.042	19.338,45	19.561,45
4	Luas Irigasi kabupaten (m2)	21193,45	21.193,45	21.193,45	21.193,45	21.193,45

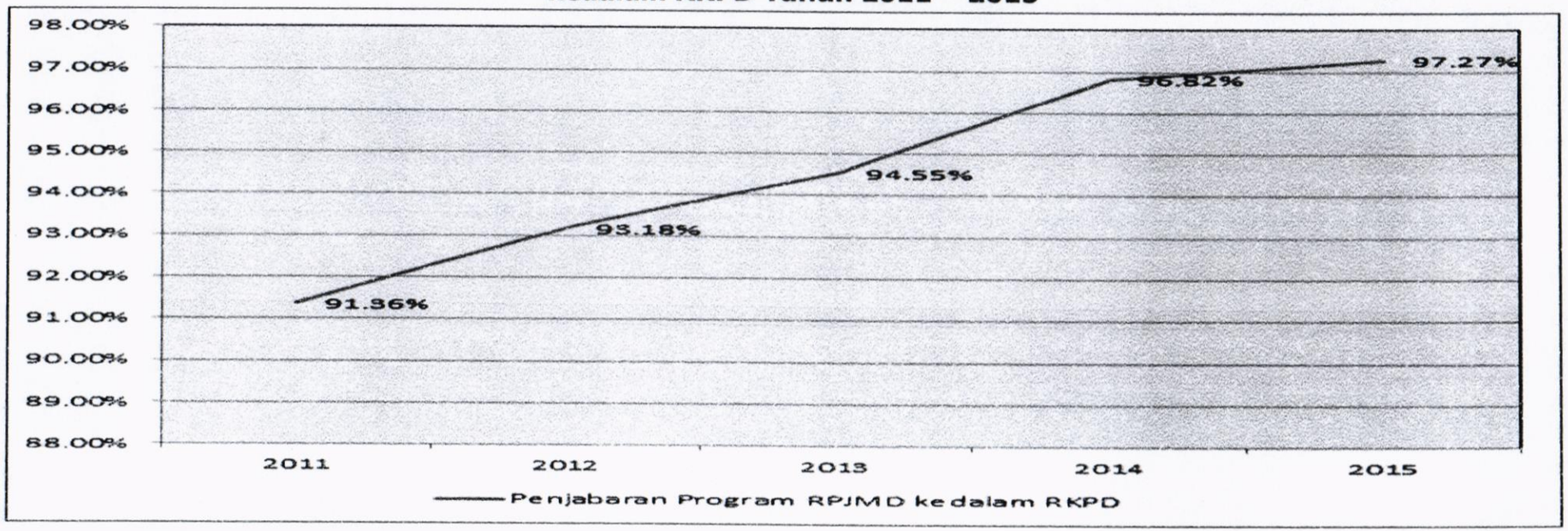


PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

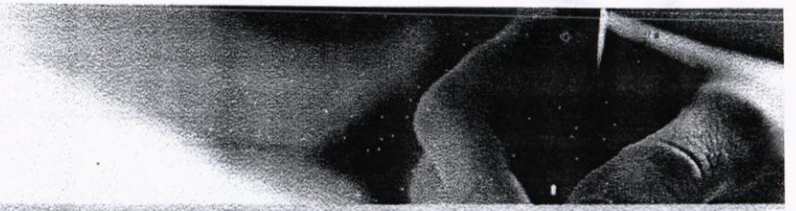
GAMBARAN UMUM KINERJA TAHUN 2014

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015.
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 96% yaitu jumlah program RKPD sebanyak 212 buah dan jumlah program RPJMD sebanyak 220 buah.

Grafik : Capaian Kinerja Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2011 – 2015



PENATAAN RUANG



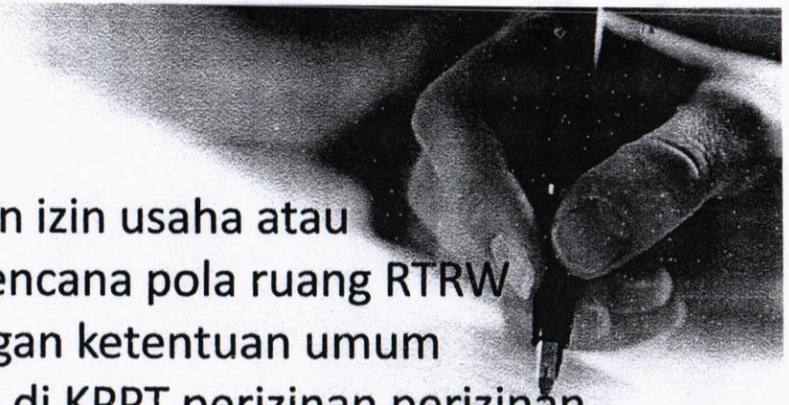
Kinerja tahun 2014 terlihat pada ketersediaan Ruang Terbuka Hijau per luas wilayah perkotaan mencapai 7,78% dengan proporsi Luas RTH 661,478 Ha dari Luas HPL/HGB 8.502,717 Ha.

Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan pembahasan forum BKPRD dalam rangka penerbitan rekomendasi BKPRD sebanyak 20 buah atau meningkat 45,86% dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kondisi investasi di Kabupaten Rembang semakin baik.

Perkembangan pelaksanaan penataan ruang periode jangka menengah tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 didiskripsikan pada pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. **Perencanaan Tata Ruang,**
   a. Th 2011 Penetapan Perda RTRW
   b. Th 2012 penyusunan dokumen RDTR Kawasan Perkotaan di 5 Kecamatan
   c. Th 2013 penyusunan dokumen RDTR Kawasan Perkotaan di 5 Kecamatan
   d. Th 2014 penyusunan dokumen RDTR Kawasan Perkotaan di 4 Kecamatan

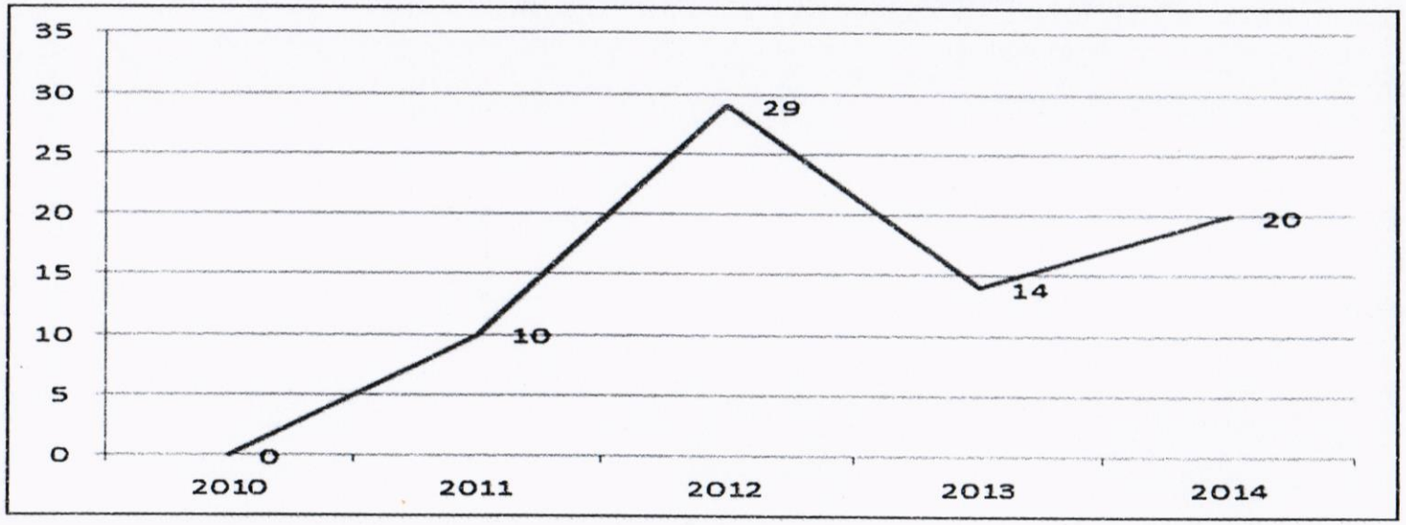
2. **Pemanfaatan Tata Ruang** yaitu pelaksanaan indikasi program perwujudan struktur dan pola ruang RTRW melalui proses perencanaan, pembahasan, penetapan sampai dengan pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahun maupun yang dilakukan masyarakat dan swasta yang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kondisi di lapangan



3. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Pada pelaksanaannya khususnya pada permohonan izin usaha atau investasi telah dilakukan penelaahan kesesuaian rencana pola ruang RTRW Kabupaten, pengendalian pemanfaatan ruang dengan ketentuan umum peraturan zonasi RTRW dan pelaksanaan perizinan di KPPT perizinan perizinan teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelaahan kesesuaian rencana tata ruang tersebut dilaksanakan dalam forum BKPRD dan menghasilkan rekomendasi BKPRD sebagai salah satu pertimbangan penerbitan izin prinsip, izin lokasi dan izin teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grafik : Perkembangan Penerbitan Rekomendasi BKPRD Usaha / Investasi Tahun 2010 – 2014



PERUMAHAN



Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir mengindikasikan kecenderunga meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya beserta kelengkapan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.

No	Jenis Data	Jumlah sampai dengan akhir tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	41,60%	43,56%	51,85%	54,44%	61,33%
	a. RT pengguna air bersih	68.193	77.730	92.361	98.873	112.046
	b. Jumlah seluruh rumah tangga	163.926	178.432	178.141	181.603	182.692
2.	Rumah Tangga Bersanitasi	40,23%	45,27%	42,76 %	50,36 %	55,61 %
	a. Jumlah rumah tangga bersanitasi	65.942	80.772	76.180	91.460	101.592
	b. Jumlah seluruh rumah	163.926	178.432	178.141	181.603	182.692
3.	Rumah Layak Huni	38,72%	41,18%	47,85 %	50,75 %	64,06 %
	a. Jumlah rumah layak huni	62.672	67.794	79.475	85.189	108.662
	b. Jumlah seluruh rumah	161.860	164.612	166.103	167.845	169.627
4.	Rasio rumah ber-IMB	1,35%	1,51%	1,63%	1,69%	1.77%
	a. Jumlah rumah ber-IMB	2.206	2.481	2.700	2.844	2.996
	b. Jumlah rumah seluruhnya	163.926	164.612	166.103	167.845	169.627
5.	Lingkungan Permukiman Kumuh	19,76%	18,81%	18,25%	17,70%	15,76%
	a. Lingkungan Permukiman Kumuh (ha)	1.482	1.411	1.369	1.328	1.182
	b. Luas Wilayah pemukiman (ha)	7.501	7.501	7.501	7.501	7.501
6.	Kawasan kumuh	19,75%	18,81%	18,25%	17,71%	15,77%
	a. Luas kawasan kumuh (ha)	20.032	19.078	18.506	17.956	15.989
	b. Luas wilayah kabupaten (ha)	101.408	101.408	101.408	101.408	101.408

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif dengan karakter kebangsaan yang kuat, guna menciptakan sumber daya manusia yang sportif dan berprestasi

Kinerja penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olah raga selama lima tahun diwarnai dengan berbagai prestasi diberbagai cabang olah raga dan ditandai dengan kecenderungan terjadinya penambahan fasilitas olahraga yang terindikasi dari penambahan jumlah gelanggang olahraga dari sebanyak 8 buah pada tahun 2010 menjadi 19 buah pada tahun 2014, dan jumlah lapangan olah raga pada tahun 2010 sebanyak 604 buah bertambah menjadi 614 buah pada tahun 2014.

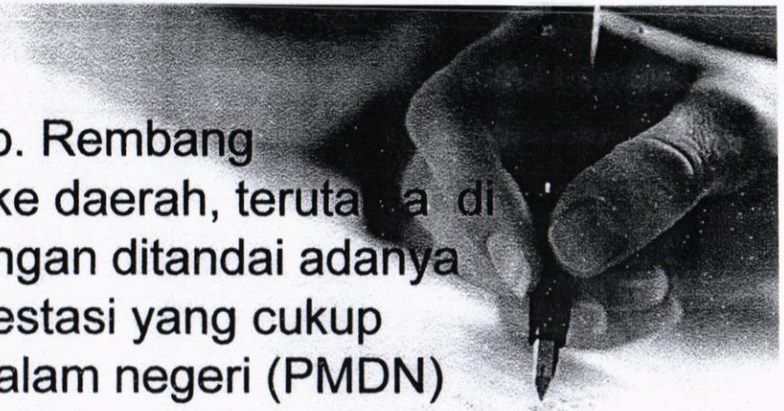
PENANAMAN MODAL

- Nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2014 mencapai nilai sebesar Rp. 523.508.163.698,

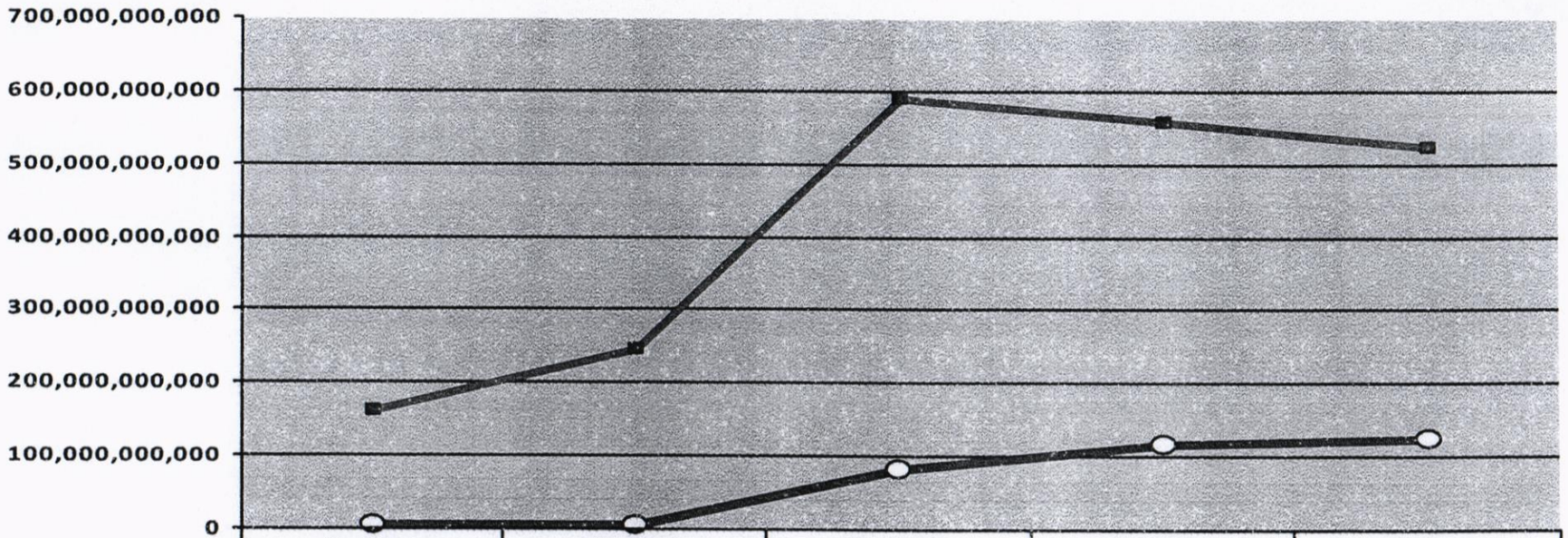
- Nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) mengalami peningkatan sebesar 7% yaitu mencapai Rp. 123.321.550.780,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 115.058.798.954,-

Nilai realisasi investasi yang cukup besar terlihat pada PT. BINTANG KARYA LAUT yang bergerak di bidang usaha sektor pengolahan ikan dengan nilai investasi mencapai Rp. 33 milyar dan Gudang ALFAMART yang bergerak di bidang usaha sektor perdagangan.

Dalam tahap konstruksi/pembangunan terdapat PT. Semen Indonesia, PT. SIR yang keduanya bergerak di usaha industri semen, serta PT. Rembang Smelter Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri besi dan baja dasar, yang berpotensi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.



- Selama 5 tahun terakhir penanaman modal di Kab. Rembang diwarnai dengan semaraknya investasi yg masuk ke daerah, terutama di sektor pertambangan dan industri pengolahan, dengan ditandai adanya kecenderungan terjadinya perkembangan nilai investasi yang cukup signifikan yaitu nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dari sebesar Rp. 161.763.155.533,- pada tahun 2010 bertambah menjadi Rp. 523.508.163.697,- pada tahun 2014, dan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) dari sebesar Rp. 4.073.789.678,- pada tahun 2010 bertambah menjadi sebesar Rp. 123.321.550.780,- pada tahun 2014.



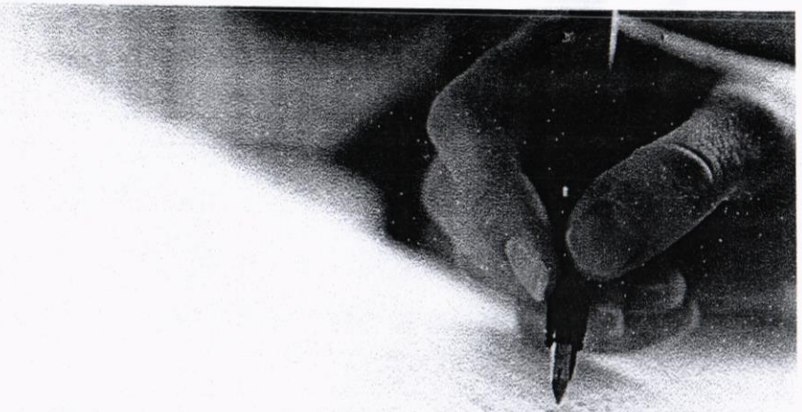
	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
PMDN	161,763,155,533	245,581,648,336	589,262,849,094	558,663,876,698	523,508,163,497
PMA	4,073,789,678	4,073,789,678	81,728,301,614	115,058,798,954	123,321,550,780

Koperasi dan UMKM



Koperasi dan UKM telah terbukti mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, sekaligus mampu menjadi soko guru perekonomian nasional dan daerah. Koperasi dan kelompok-kelompok UKM yang ada akan terus Kita lakukan penguatan guna mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh.

- Jumlah Koperasi aktif pada tahun 2014 mencapai mencapai 437 unit atau 78,88 % dari jumlah koperasi sebanyak 554 unit.
- Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 37.513 atau 95,30% dari jumlah seluruh UKM sebanyak 39.363 unit



Selama 5 tahun terlihat kecenderungan perkembangan koperasi aktif dimana pada tahun 2010 sebanyak 392 unit koperasi aktif menjadi 437 unit pada tahun 2014, usaha mikro dan kecil pada tahun 2010 sebanyak 16.847 unit menjadi 37.513 unit pada tahun 2014, dan UKM pada tahun 2010 sebanyak 272 unit menjadi 1.850 unit pada tahun 2014

No	Jenis Data	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	JUMLAH KOPERASI	518	532	548	549	554
	- Koperasi Aktif	392	410	431	432	437
	- Koperasi Tidak Aktif	126	122	117	117	117
2.	Jumlah Usaha Mikro Kecil	16.847	20.826	26.167	33.900	37.513
3.	Jumlah UKM	272	272	1.138	1.850	1.850

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



Kinerja tahun 2014 terlihat pada :

- Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 421.120 lembar
- Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 44.911 lembar
- Penerbitan akta kematian sebanyak 64 lembar
- Kepemilikan akta kelahiran sebanyak 432.628 orang
- Pelayanan pindah penduduk sebanyak 703 orang
- Pelayanan dating penduduk sebanyak 1.880 orang

Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditandai dengan terjadinya perubahan kartu identitas kependudukan menuju KTP-El, dimana sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk yang sudah memiliki dan terekam KTP-El sebanyak 421.120 orang atau 86,61% dari seluruh jumlah penduduk wajib KTP-El sebanyak 486.215 orang,
Sedangkan Kepemilikan Akta Kelahiran per seribu penduduk sebanyak 706,27 atau sebanyak 432.628 jiwa dari jumlah seluruh penduduk 612.552 jiwa

KETENAGAKERJAAN



- Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 330.553 pekerja atau 73,23 % dari 451.375 penduduk, dengan penduduk usia kerja .
- Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 53,68% atau 888 pekerja dari 1.654 pendaftar kerja.

Selama 5 tahun terakhir rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) diatas 75%, dan prosentase angkatan kerja yang ditempatkan dari pendaftar kerja terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 19,9% menjadi 53,68% pada tahun 2014.

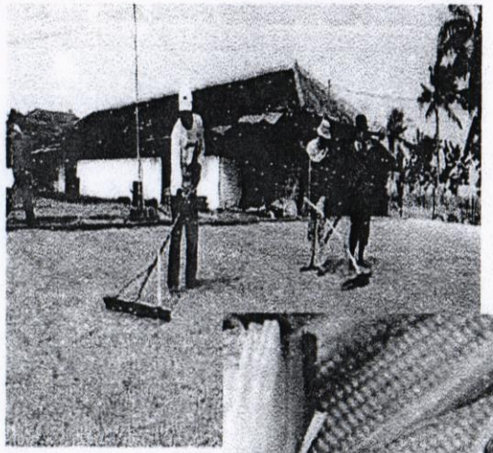
No	Jenis data	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	330.064	330.650	336.613	337.263	330.553
2.	Jumlah Penduduk usia kerja (15-64 thn)	462.469	412.766	420.269	325.364	451.375
3.	Jumlah pencari pekerja yg ditempatkan	436	325	293	475	888
4.	Jumlah pencari pekerja yang mendaftar	1.292	1.920	2.083	2693	1.654
5.	Jumlah peserta latihan ketrampilan kerja	125	224	384	224	228
6.	Buruh / Pekerja peserta Jamsostek	3.352	3.490	3.571	2.556	3.330
7.	Jumlah Keseluruhan Buruh / Pekerja	8.231	12.067	13.120	13.606	13.889

KETAHANAN PANGAN



Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kab. Rembang diarahkan pada upaya mengembangkan sistem database perencanaan dan ketersedian informasi ketahanan pangan, serta melaksanakan analisa ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

Ketersediaan pangan utama per seribu penduduk mencapai 131,28 kg





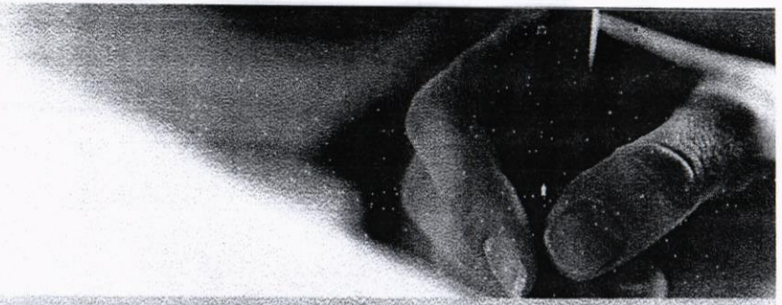


- Beras : 95.862,78 ton
- Jagung : 117.097,58 ton
- Kedelai : 4.896,58 ton
- Ubi kayu : 25.190,08 ton

Kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan pangan selama 5 tahun terakhir menunjukkan kemampuan dalam menjaga ketersediaan pangan daerah, yang terindikasi dari indikator ketersediaan pangan utama rata-rata masih diatas 131,23 kg per seribu penduduk.

Di sisi lain juga telah tersusun regulasi ketahanan pangan berupa :

- SK Bupati Rembang Nomor 500/96/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang
- Peraturan Bupati Rembang Nomor : 25 Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang.



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 3,2% atau 3.715 dari 115.113 pekerja perempuan
- Angka melek huruf perempuan usia di atas 15 th mencapai 89,14% atau 213.184 dari 239.157 perempuan di kelompok usia tersebut
- Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 51 % atau mencapai 64.559 dari total 124.416 angkatan kerja perempuan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat peran perempuan yang semakin mewarnai lembaga pemerintahan dan penghargaan-penghargaan terkait kebijakan pengarusutamaan gender dan keberpihakan kebijakan terhadap anak di Kabupaten Rembang

KB DAN KELUARGA SEJAHTERA

Prevalensi peserta KB aktif mencapai 82,74 %

- Peserta program KB aktif sebanyak 111.777 orang
- Pasangan usia subur sebanyak 135.085

Keluarga Prasejahtera & Keluarga Sejahtera I sebanyak 55 %

- keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sebanyak 106.372
- Jumlah keluarga sebanyak 193.532

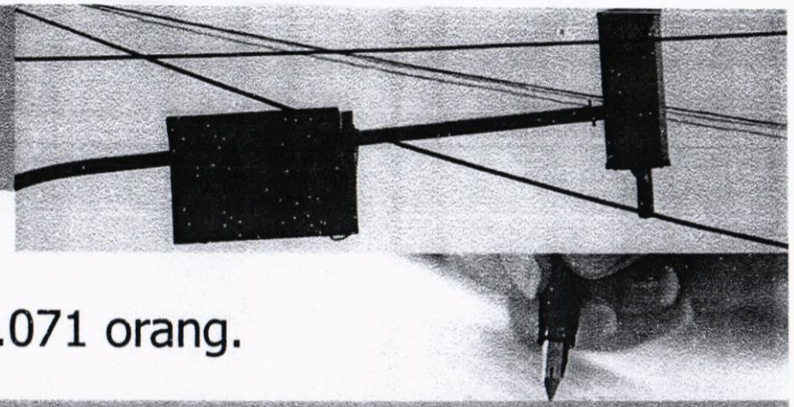
Rasio PLKB/PKB di setiap desa Kelurahan mencapai 22,79 %

(67 PLKB melayani 294 desa/kelurahan)

Selama lima tahun terakhir partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif cukup signifikan dengan rata-rata peserta KB aktif masih diatas 80%, yang diikuti dengan rasio PLKB/PKB di setiap desa/kelurahan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dimana sudah mencapai 22,79%. Sedangkan prosentase keluarga pra sejahtera/keluarga sejahtera 1 berada pada kisaran 55%,

Jenis Data	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Peserta KB Aktif	109.329	110.366	133.356	113.796	111.777
Peserta KB Baru	15.679	18.704	15.984	17.253	16.466
Pasangan Usia Subur	131.609	132.754	134.850	136.505	135.081
Keluarga Pra Sejahtera (KK)	97.355	96.998	95.017	96.008	94.514
Keluarga Sejahtera I (KK)	12.990	10.929	10.822	10.885	11.858
Jumlah Keluarga (KK)	185.863	188.754	188.754	191.003	193.532
Jumlah petugas PLKB/PKB	76	76	74	68	67

PERHUBUNGAN



Jumlah angkutan darat sebanyak 925 unit

Jumlah penumpang Angkutan darat sebanyak 2.156.071 orang.

Selama periode tahun 2010-2014 terlihat kecenderungan perbaikan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan

NO	Indikator Kinerja	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
1.	Pelanggaran ijin trayek	101	98	34	40	33
2.	Pelanggaran uji	110	107	71	58	58
3.	Pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya	9	22	1	0	0
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	4.027	4.382	4.998	5.417	6.546
5.	Kendaraan Bermotor yg di Uji	8187	8.756	9.232	9.729	10.216
6.	Pelanggaran Jalur Penangkapan/pelayaran	3	0	0	0	0
7.	Pelanggaran Alat Penangkapan Ikan	3	0	0	2	0
8.	Pelanggaran Pencurian Ekosistem Laut yang dilindungi	2	0	0	0	0
9.	Pelanggaran Kelengkapan Dokumen Kapal	51	10	105	105	79
10.	Jumlah Angkutan Darat	546	579	614	748	925
11.	Jumlah penumpang angkutan darat	6.945.950	2.981.268	2.970.956	2.351.737	2.156.071
12.	Kecelakaan di Laut	-	5	1	5	2



KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa, peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi, serta peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi

http: rembangkab.go.id (website milik Pemkab Rembang) dan penyelenggaraan Rembang Expo yg rutin dilaksanakan, diharapkan sebagai media komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan globalisasi informasi dalam mendukung pelayanan masyakarat

PERTANAHAN



Sejalan dengan kebijakan nasional bidang pertanahan pada periode tahun 2010-2014 maka secara prinsip pelaksanaan kewenangan tsb menyesuaikan dengan agenda pembangunan di Kabupaten Rembang.

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai kebutuhan melalui instansi/SKPD yang membutuhkan tanah.
2. Ijin lokasi melalui KPPT sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
3. Ganti kerugian diberikan bila ada kegiatan pengadaan tanah.
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah menyesuaikan agenda Landreform dari BPN.
5. Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, berupa pemberian rekomendasi terkait tanah Negara dan lain-lain.
6. Perencanaan penggunaan tanah, pada tahun 2014 melalui KPPT mulai diawali penyusunan perbub tentang Alih Fungsi Lahan dalam rangka pelayanan pemberian ijin alih fungsi lahan.

Sampai dengan tahun 2014 yg bersertifikat seluas 912 hektar atau sekitar 0,9% dari luas wilayah Kabupaten Rembang (101.408 hektar)

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DLM NEGERI

kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama lima tahun terakhir menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat dan terwujudnya kondusifitas lingkungan masyarakat yang dicerminkan dari suksesnya pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013, dan pemilihan legislatif tahun 2014, serta pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014.



OTONOMI DAERAH & PEMERINTAHAN UMUM

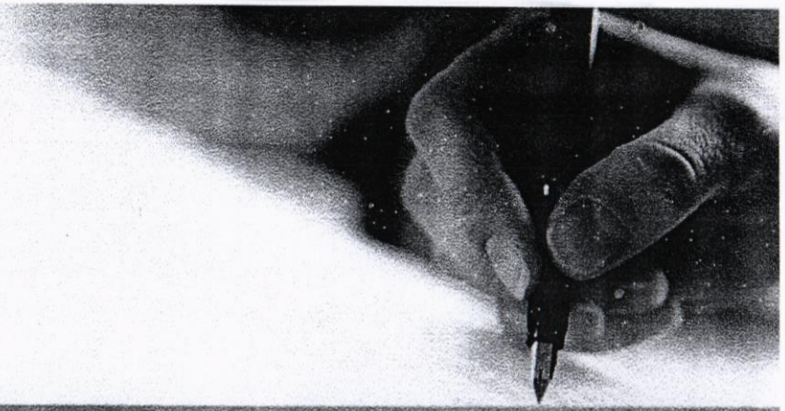
Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum diarahkan pd upaya :

- terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- harmonisasi hubungan antar kecamatan, desa, maupun kelurahan
- koordinasi pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan
- kerjasama daerah
- koordinasi penegakan HAM serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



DUKUNGAN SARPRAS PEMERINTAHAN

- Produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2014 berupa 12 Perda, 46 Peraturan Bupati, 1.379 Keputusan Bupati
- Jumlah PNS mencapai 8.499 orang
- Alokasi APBD sebesar Rp. 1.540.612.631.176,-



ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH & ASET DAERAH

Realisasi belanja APBD terhadap anggaran belanja sebesar 83 %
(Realisasi : Rp. 1.275.908.646.560,06 Anggaran : Rp. 1.540.612.631.176,00)

Belanja untuk pelayanan dasar mencapai Rp. 933.346.532.338,06 (73 %)

Belanja utk pendidikan & kesehatan sebesar Rp. 654.645.809.682,06 (51 %)

Kondisi asset hingga tahun 2014 mencapai nilai Rp. 1.687.588.013.336,50

Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah



Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Rasio (%)
2010	65.729.033.022,00	681.400.890.462,00	9,65
2011	73.931.945.930,62	873.464.930.507,62	8,46
2012	103.304.514.980,86	1.017.711.677.635,86	10,15
2013	126.808.083.812,01	1.165.433.076.124,01	10.88
2014	165.530.925.487,27	1.329.587.756.593,27	12,45

Realisasi PAD terhadap potensinya

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio (%)
2010	78.227.428.000,00	65.729.033.022,00	84,02
2011	83.354.852.000,00	73.931.945.930,62	88,70
2012	95.041.791.800,00	103.304.514.980,86	108,69
2013	127.132.548.700,00	126.808.083.812,01	99,74
2014	159.050.536.339,00	165.530.925.487,27	104,07
		Rata-rata	97,04

Perekonomian Daerah



- Distribusi beras miskin (raskin) di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 mencapai 12.422,52 ton beras dengan jumlah penerima sebanyak 69.014 RTSM
- Penyertaan modal sebesar 11,6 milyar rupiah ke beberapa BUMD dan Bank Jateng. Penyertaan modal ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan dari modal dasar beberapa BUMD yang ada dan untuk meningkatkan volume perkreditan serta perluasan layanan kepada masyarakat, juga untuk meningkatkan PAD.
- Deviden yang diterima Pemkab Rembang pada tahun 2014 mencapai 3,92 milyar rupiah.

Dalam rangka meningkatkan potensi perekonomian di Kab. Rembang, sejak tahun 2011 telah dicanangkan Program Desa Wisata Batik Tulis Lasem.

Lokasi di Kecamatan Lasem : Desa Babagan dan Desa Karasgede

di Kecamatan Pancur : Desa Karaskepoh, Desa Tuyuhan dan Desa Pancur

Maksud dan tujuannya adalah untuk melestarikan, mempromosikan & mengembangkan batik tulis Lasem, serta meningkatkan kreatifitas dan pendapatan pengrajin, juga untuk mengenalkan potensi sejarah dan budaya di lingkungan sekitarnya



PENGAWASAN DAERAH

- Pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus sebanyak 93 kasus dan pemeriksaan reguler Kab. Rembang sebanyak 133 obyek pemeriksaan;
- Rasio temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti mencapai 82,19% (323 selesai dari total rekomendasi 393 buah);
- Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan sebanyak 253 temuan (165 temuan selesai, 21 hasil temuan masih dalam proses dan 67 temuan belum selesai)
- Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah selama 2 tahun terakhir berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, serta meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat

- PKK aktif mencapai 100% dari jumlah 309 PKK yg ada
- Posyandu aktif mencapai 100% dari jumlah 1.225 posyandu yg ada

Bidang SOSIAL

- Jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo & panti rehabilitasi) s.d tahun 2014 sebanyak 16 unit
- Penanganan PMKS sebanyak 8.532 orang dari 145.683 orang , sebanyak 8.286 orang (5,27%) yang menerima bantuan

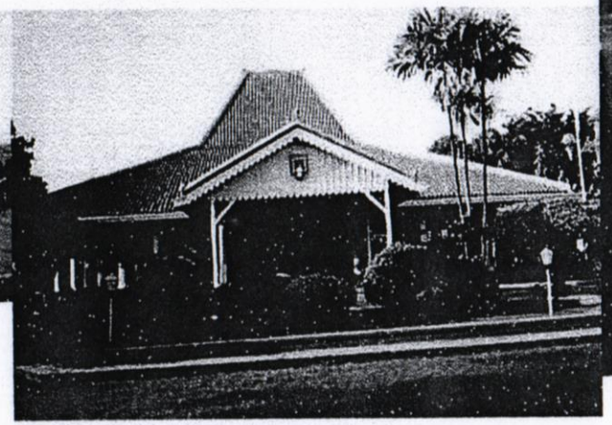
Selama 5 tahun terakhir, keseriusan pemerintah daerah dlm menangani masalah sosial terlihat dari jumlah sarana sosial yang terus bertambah dari 10 buah pada tahun 2010 menjadi sebanyak 16 buah pada tahun 2014, pemberian bantuan sosial kepada PMKS yang terus bertambah meskipun masih relatif kecil dari tahun 2010 sebesar 0,6% menjadi 5,27% pada tahun 2014, serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terus bertambah dari 0,48% pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,85% pada tahun 2014.

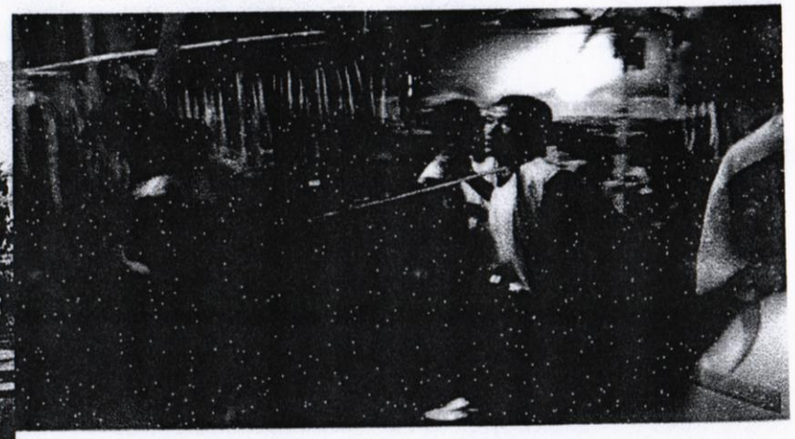
BID. KEBUDAYAAN



Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pd upaya meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME







Selama 5 tahun terakhir, terlihat perkembangan yg menggembirakan yg terindikasi dari semakin meriah dan meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 3 festival pada tahun 2010 menjadi 9 festival pada tahun 2014, Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya bertambah dari 2 buah pada tahun 2010 menjadi sebanyak 6 buah pada tahun 2014, serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sebanyak 43 buah pada tahun 2010 menjadi 47 buah pada tahun 2014.

BIDANG STATISTIK



Dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- Rembang Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka,
- PDRB Kab. Rembang,
- Indikator Sosial Ekonomi,
- Analisis kemiskinan Kabupaten Rembang
- Indek kesejahteraan Petani



BIDANG KEARSIPAN

Program yang dilaksanakan berupa Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Program Pengkajian serta Program Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

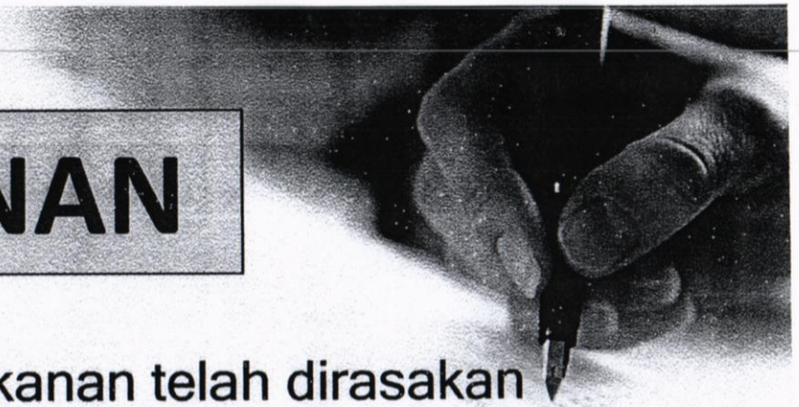
- ✓ Penerapan pengelolaan arsip secara baku di SKPD mencapai 45 % (30 dari 46 unit SKPD)
- ✓ Pembinaan petugas pengelola kearsipan sebanyak 30 kali.



BIDANG PERPUSTAKAAN

- Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakan daerah sebanyak 13.048 bh (49,03%) dari jumlah koleksi buku yang tersedia 26.582 buah.
- Pengunjung perpustakaan mencapai 14.272 orang dari jumlah populasi yang harus dilayani 611.495 orang

KELAUTAN & PERIKANAN



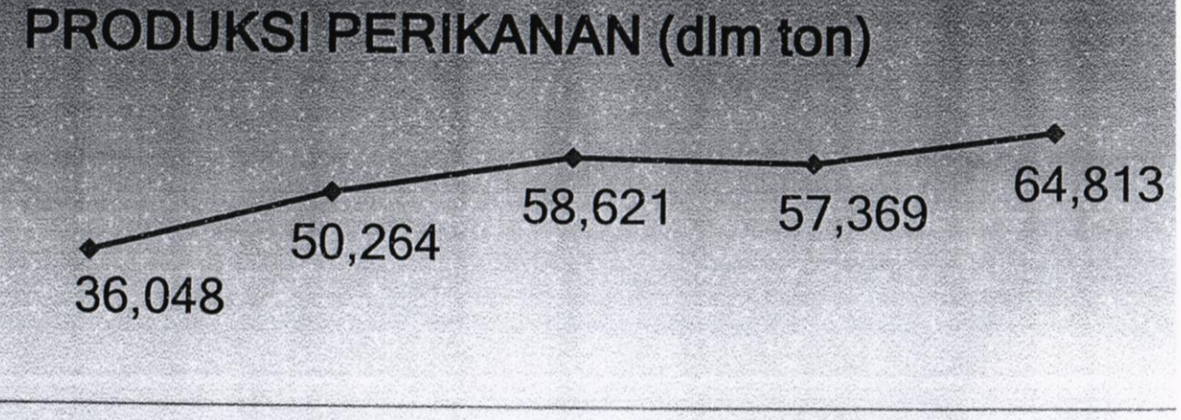
Hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan telah dirasakan mengalami perkembangan positif yang terindikasi dari capaian kinerja.

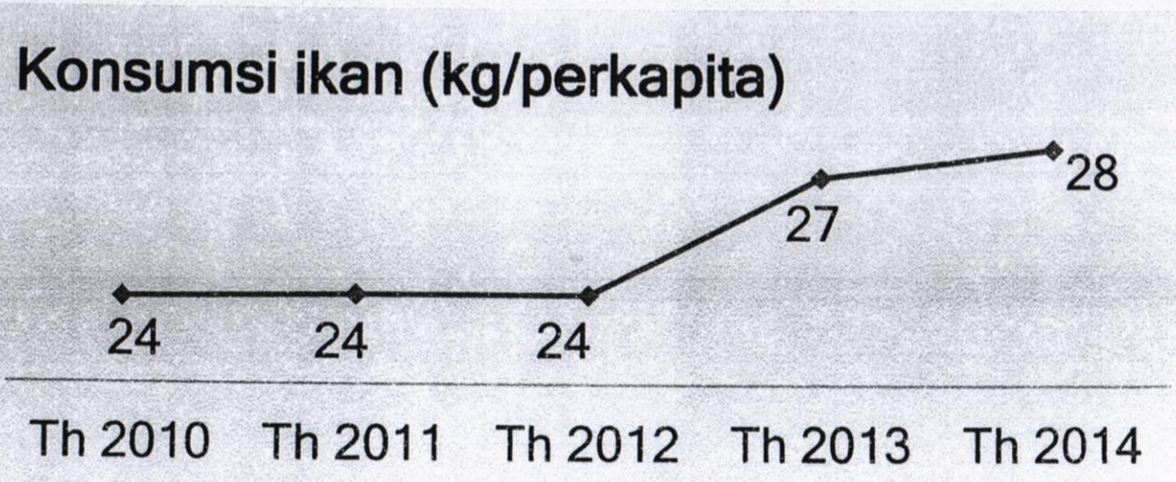


- Produksi perikanan tahun 2014 mencapai 64.813,26 ton dari yang ditargetkan sebesar 64.988,90 ton.
- Konsumsi ikan perkapita mencapai 28 kg dari target yang ditetapkan sebesar 25 kg yg berarti capaian kinerja sebesar 113%.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 16,72% . Demikian halnya dengan jumlah konsumsi ikan perkapita mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 3,8%







PERTANIAN

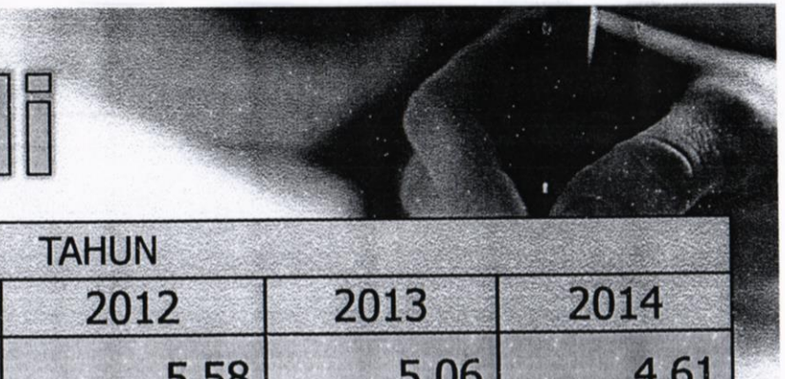


Produktivitas di tahun 2014

- Padi : 4,69 ton/Ha
- Jagung : 4,76 ton/Ha
- Kedelai : 1,04 ton/Ha
- Ubi Kayu : 26,85 ton/Ha

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, capaian kinerja bidang pertanian menunjukan perkembangan yang positif.

Produktivitas padi



Jenis data	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Produktivitas padi(ton/ha)	5,45	5,47	5,58	5,06	4,61
Produksi tanaman Padi (ton)	226.856	246.656	225.476	227.759	183.001
Luas Panen (hektar)	41.587	45.130	40.407	44.969	39.673

Menurunnya produksi padi pd akhir periode cenderung disebabkan kompetisi antar komoditas, dalam hal ini luas tanam padi sebagian beralih untuk komoditas tebu dan tembakau.

selama 5 tahun terakhir, tingkat produktivitas padi masih dapat dipertahankan dengan rata-rata 5,23 ton per hektar

Pertanian masih menjadi sektor dominan terhadap stuktur PDRB di Kabupaten Rembang, dengan kontribusi sebesar 43 %.

KEHUTANAN



Pembangunan bidang kehutanan di Kabupaten Rembang dihadapkan pada permasalahan masih terdapatnya lahan kritis seluas 6.065 hektar dan kerusakan kawasan hutan seluas 253,80 hektar

Dari luas lahan kritis dan kerusakan hutan tersebut, pada tahun 2014 telah tertangani seluas 2.572,60 hektar atau sekitar 40,71 % dari luas lahan kritis dan hutan yang rusak sekitar 6.319,40 hektar.

Luas kerusakan kawasan hutan secara maksimal dapat ditekan dibawah 1,06 % atau hanya seluas 253,8 hektar dari total luas kawasan hutan yang mencapai 23.922,06 hektar.

Reboisasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis

No	KINERJA	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Reboisasi Hutan (Ha)	415,3	1.018,4	1.007,8	980,5	2.030,6
2	Rehabilitasi	600,0	1.639,1	1.589	950	542
3	Luas Lahan Kritis (Ha)	10.098,5	8.459,3	8.329	7.652	6.065,60
4	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	173,0	135,0	80,75	217,1	253,80
5	Luas Kawasan Hutan (Ha)	23.922,06	23.922,06	23.922,06	23.922,06	23.922,06

Kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan selama 5 tahun terakhir telah mampu menurunkan luas lahan kritis rata-rata 11,65% dari tahun-ke tahun.



ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

Peran sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjukkan peningkatan nyata dalam pembangunan daerah. Bukan hanya dalam bentuk sumber penerimaan daerah saja, tetapi mencakup kegiatan ekonomi lain seperti penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, bahan bakar domestik dan memacu efek berantai ekonomi.

- peningkatan tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang bijaksana disertai penerapan teknologi yg dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan.
- ketersediaan sumber energi migas yang semakin terbatas, juga perlu direspon dengan meningkatkan efisiensi penggunaanya disamping terus mencari teknologi dan sumber-sumber energi alternatif yang murah.



- Kinerja bidang ESDM tahun 2014 ditunjukkan dengan terkendalinya pertambangan tanpa ijin 0 % sehingga tidak terdapat penambangan liar yang perlu ditertibkan.
- Dengan luas area penambangan mencapai 110,83 hektar, sektor pertambangan mampu berkontribusi terhadap PDRB sebesar 1,92 %

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perkembangan capaian bidang ESDM ditunjukkan dg terkendalinya kegiatan pertambangan yang terindikasi dari tertibnya pengeluaran perijinan pertambangan.

No	KINERJA	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Perusahaan Pertambangan	110	247	235	81	32
2	Luas pertambangan tanpa ijin	-	-	-	-	-
3	Luas total area tambang (Ha)	471,57	891,86	1.069,30	169,37	110,83





PARIWISATA

Upaya mendorong perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang menuju era industri pariwisata perlu lebih ditekankan untuk menangkap sejumlah peluang investasi dlm rangka mengoptimalkan penataan obyek wisata, mengatasi kurangnya sarana promosi, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan serta kualitas SDM pariwisata

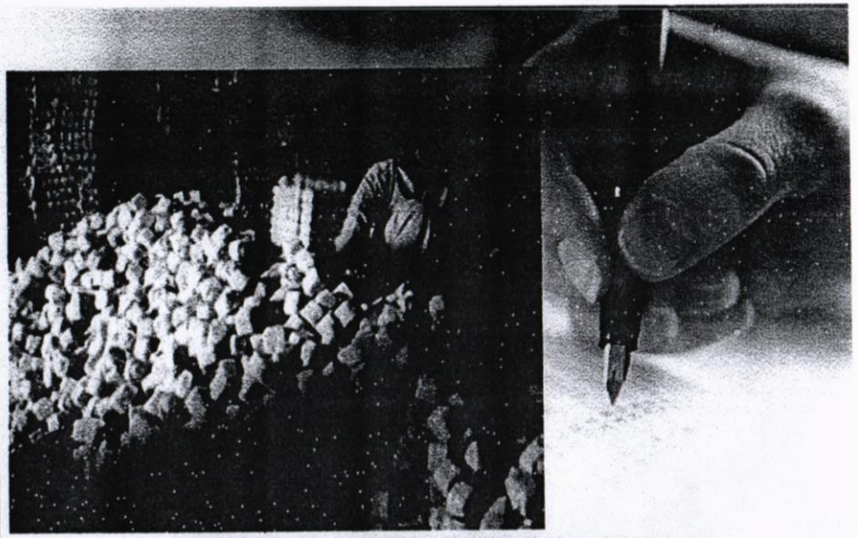


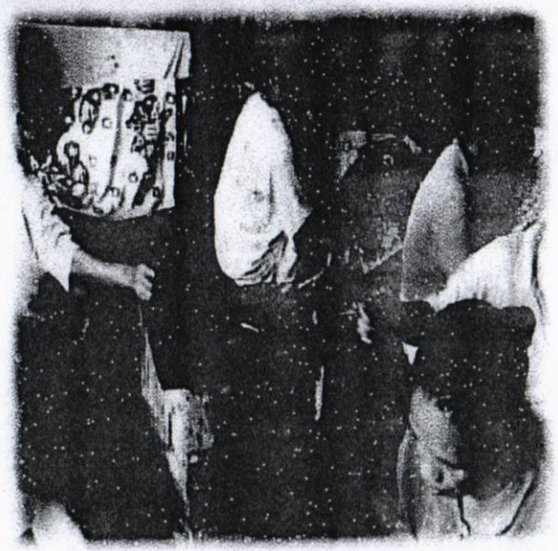
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah kunjungan wisata cenderung fluktuatif, sehingga pendapatan obyek wisata juga terpengaruh.

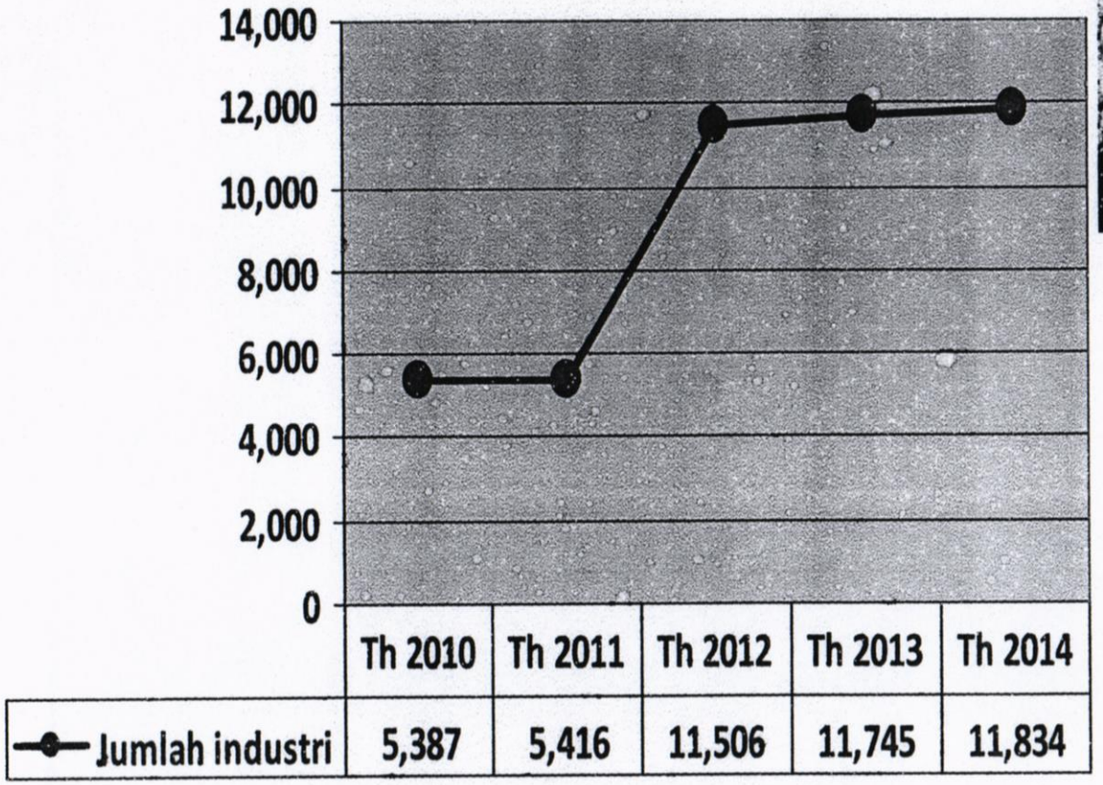
Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Obyek Wisata Tahun 2010-2014

Tahun	Kunjungan wisata	Pendapatan Obyek wisata (Rp.)
2010	298.185	977.113.860
2011	432.671	668.824.240
2012	1.321.411	1.325.758.920
2013	2.345.107	999.750.900
2014	993.363	1.099.229.060

INDUSTRI







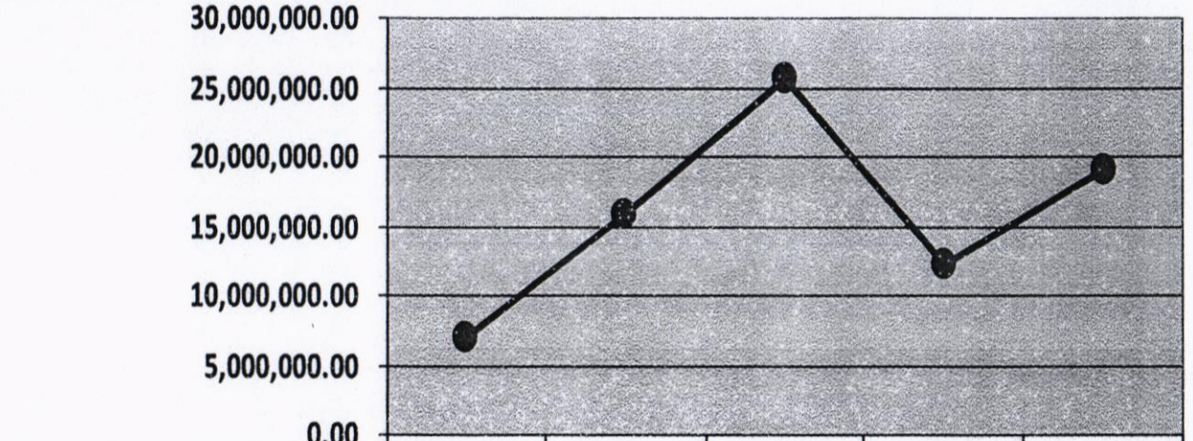
Dalam kurun waktu 2010-2014, industri di Kab. Rembang menunjukkan perkembangan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,49% per tahun.

PERDAGANGAN



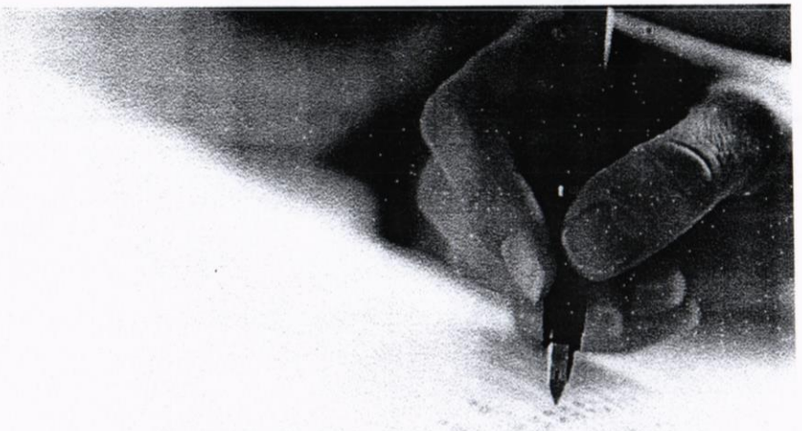
Sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua dalam PDRB Rembang, kontribusinya mencapai 17,06 %

Selama periode 2010-2014, meskipun nilai ekspor bersih terlihat fluktuatif namun menunjukkan tren meningkat untuk tahun-tahun mendatang yang diindikasikan dgn dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 48,7% per tahun



	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2013	Th 2014
Nilai Ekspor bersih (US$)	6,910,232.33	15,937,534.1	25,751,858.8	12,205,493.3	18,983,364.6

TRANSMIGRASI



Kebijakan pembangunan bidang transmigrasi diarahkan pada upaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi

Pada tahun 2014 pengiriman transmigran umum sebanyak 3 KK sesuai kuota dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Dengan segenap pencapaian serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, kita patut berbangga dengan berbagai bentuk apresiasi berupa sejumlah penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut :

1. Penghargaan Adibakti Mina Bahari (tahun 2010 dan 2013)
2. Penghargaan Keikutsertaan Program Pengembangan Kota Hijau (tahun 2011)
3. AMPL Award Tingkat Nasional (tahun 2011)
4. Penghargaan Rumah Sakit Quality Management System ISO 9001:2008 (tahun 2011)
5. Penghargaan Nasional Sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya pada tahun 2011 dan Kategori Madya pada tahun 2012 dan 2013
6. Parahita Eka Praya (Kategori Madya pada tahun 2010 dan Kategori Utama berturut-turut pada tahun 2012, 2013 dan 2014)
7. Penghargaan atas peningkatan produksi beras diatas 5 persen (tahun 2012)



8. Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil (pada tahun 2012 & 2013)
9. Penghargaan Peduli Penanaman Satu Milyar Pohon (tahun 2012)
10. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional (tahun 2013 dan 2014)
11. Penghargaan atas pencapaian target perekaman e-KTP lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan (pada tahun2012)
12. Penghargaan sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi dengan peringkat Paramadhana Madya Koperasi (pada tahun 2013)
13. Penghargaan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi terbaik di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan di Tingkat Nasional (Tahun 2013)



14. Penghargaan sebagai Badan Publik Kabupaten/Kota terbaik se Jawa Tengah dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (pada tahun 2013 dan 2014)
15. Penghargaan sebagai Kabupaten dengan Akuntabilitas Kinerja Cukup Baik (pada tahun 2014)
16. Penghargaan Program Keluarga Harapan (PKH Award Th 2014)
17. Penghargaan Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional (Tahun 2014)
18. Penghargaan Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional (Tahun 2014)
19. Penghargaan atas tercapainya Universal Child Immunization (UCI) pada semua desa dan kelurahan (tahun 2014)
20. Penghargaan Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan (tahun 2014)
21. Penghargaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Terbaik Tingkat Provinsi (Th2014)

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Secara keseluruhan pencapaian indikator yang mendukung Visi dan Misi pembangunan daerah sebagaimana telah Saya uraikan di atas telah tercapai sesuai dengan target-target yang diharapkan. Namun demikian kita juga perlu menyadari bahwa untuk memenuhi harapan yang paling ideal tidaklah mudah. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan pokok pemikiran terhadap sejumlah persoalan yang dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Sejumlah persoalan tersebut terkait dengan percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, pencapaian swasembada pangan, reformasi birokrasi, serta pembangunan berbasis desa. Di masa mendatang semua persolan ini pasti memerlukan dukungan luas serta komitmen dari semua pihak untuk penanganannya secara berkesinambungan.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Memasuki tahapan ke tiga RPJPD tahun 2005-2025 sekaligus sukseksi kepala daerah, Saya berharap agar dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang tetap mendapatkan dukungan penuh dari segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Saya sangat memahami bahwa untuk dapat mewujudkan visi dan misi RPJPD tahun 2005-2025, tentunya membutuhkan dukungan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan maupun semua unsur dan elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam aktivitas perekonomian daerah. Oleh karena itu, kita perlu untuk tetap menjaga harmonisasi kehidupan pada setiap tingkat sosial di masyarakat, karena dengan terjaganya stabilitas harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, akan dapat memperkuat dan mendorong mobilisasi serta mempercepat tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara adil, merata dan menyeluruh.

Melalui kesempatan ini, Saya perlu menegaskan kembali pentingnya kesinambungan upaya perbaikan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk itu saya terus mendorong transparansi birokrasi antara lain melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah (SIMKUDA), penerapan metode pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (LPSE) serta mendorong keterpaduan sistem perencanaan dan penganggaran (SIMPEPEDA) dengan mulai menyusun raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah yang diharapkan

mampu mengoptimalkan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dengan demikian, Saya mulai membangun sistem birokrasi modern dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang yang lebih baik di masa mendatang.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Di akhir penyampaian LKPJ ini, sekali lagi Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua komponen masyarakat di Kabupaten Rembang, yang telah ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan pengawasan, saran, kritik dan koreksi, yang kesemuanya sungguh bermanfaat dalam membantu Saya mengendalikan jalannya pembangunan. Secara khusus, rasa terima kasih dan penghargaan Saya tujukan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang. Materi laporan keterangan yang saya sampaikan pada kesempatan ini pada dasarnya adalah merupakan pengantar ringkas pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama Tahun Anggaran 2014 yang rincian selengkapnya tertuang dalam dokumen Buku II serta pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang rincian selengkapnya tertuang dalam dokumen Buku III.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Periode 2010 - 2015 yang dapat Saya sampaikan. Akhirnya, kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya Saya mohon maaf,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

Hari : SELASA
Tanggal : 21 April 2015
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;
3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;
4. Pembentukan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang;
5. Skors (Pemilihan Pimpinan Pansus)
6. Persetujuan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;
7. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. MAJID KAMIL MZ**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 31 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 1 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 3 orang
5. Fraksi Gerindra : 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 2 orang
7. Fraksi Harapan : - orang

Jumlah : 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah untuk senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat-Nya, karena atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Selasa 21 April 2015 kita dapat bertemu untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 7 April 2015, selain agenda pokok Penyampaian Usul Rekomendasi dan persetujuan terhadap usul rekomendasi komisi-komisi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang, dalam Rapat Paripurna ini juga teragendakan Pembentukan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang. Untuk selengkapnya akan saya

sampaikan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;
3. Persetujuan Terhadap Usul Rekomendasi Komisi-Komisi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;
4. Pembentukan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang;
5. SKORS (pemilihan pimpinan Panitia Khusus);
6. Persetujuan penetapan Pimpinan Panitia Khusus;
7. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dijelaskan bahwa :

LKPJ yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan hasil pembahasan ditetapkan DPRD dengan Keputusan DPRD.

Merujuk hal tersebut, DPRD Kabupaten Rembang dalam hal ini komisi-komisi DPRD telah membahas dengan mengkaji dan mencermati muatan-muatan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang yang disampaikan oleh Bupati Rembang dalam rapat paripurna

tanggal 14 April 2015, dari tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015.

Dari hasil pembahasan tersebut, Komisi-komisi dapat memberikan kesimpulan terhadap materi yang disajikan dalam LKPJ dikaitkan dengan pelaksanaannya sebagai bahan rekomendasi didalam Keputusan DPRD kepada Bupati.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna hari ini adalah sebanyak 31 orang.

Menurut Pasal 80 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna selain Rapat Paripurna untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah, pemberhentian wakil kepala daerah, pemberhentian pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian maka Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap "***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 11.55 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang saya hormati,

Mari kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang. Agar dalam penyampaiannya

dapat berjalan tertib, maka kepada wakil dari masing-masing Komisi yang akan menyampaikan usul rekomendasi, saya minta untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Juru Bicara Komisi A : Muhammad Anshori
2. Juru Bicara Komisi B : Ali Ircham, ST
3. Juru Bicara Komisi C : Widodo
4. Juru Bicara Komisi D : Frida Iriani

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Komisi A dipersilakan untuk menyampaikan Rekomendasinya.

===== PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI-KOMISI DPRD====

- ***(Penyampaian Usul- usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang terlampir)***

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Komisi yang telah menyampaikan Usul Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang. Selanjutnya usul rekomendasi tersebut akan dituangkan dalam **Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang,** untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Memasuki acara ketiga yaitu Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi Komisi-Komisi menjadi Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Akhir Tahun

Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam Rapat Paripurna ini :

" Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang yang disampaikan oleh Komisi A dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? "

========= ***Setujuuu ...!!!*** ==========

(Ketuk palu 1 kali)

" Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang yang disampaikan oleh Komisi B dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? "

========= ***Setujuuu...!!!*** ==========

(Ketuk palu 1 kali)

" Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang yang disampaikan oleh Komisi C dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? "

========= ***Setujuuu....!!!!*** ==========

(Ketuk palu 1 kali)

" Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang yang disampaikan oleh Komisi D dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? "

========= ***Setujuuu !!!*** ==========

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Baru saja kita ikuti agenda penyampaian usul rekomendasi dan persetujuan terhadap usul rekomendasi Komisi-Komisi atas LKPJ, dan untuk selanjutnya kita masuk acara ke empat yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pada Pasal 65 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa *" Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dan Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi".*

Adapun sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2015 telah disepakati bahwa komposisi keanggotaan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH
1	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	5 orang
2	Fraksi Demokrat	4 orang
3	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	3 orang
4	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	4 orang
5	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	2 orang
6	Fraksi Karya Sejahtera	2 orang
7	Fraksi Harapan	2 orang
	JUMLAH	22 orang

Terkait hal tersebut dan atas dasar usulan dari masing-masing Fraksi telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang

susunan Keanggotaan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang, sebagaimana fotocopy yang berada ditangan saudara anggota DPRD semuanya. Dan sebelum nantinya Rancangan Keputusan tersebut disahkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna hari ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat :

" Apakah Calon Anggota Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? "

==========Setujuuu ! ! ! ==========

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat dewan yang berbahagia,

Dengan telah disetujuinya keanggotan Panitia Khusus, maka perlu dipilih pimpinan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang dalam rapat paripurna ini. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa *" Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus ".*

Untuk keperluan tersebut maka saya berikan kesempatan kepada anggota panitia Khusus untuk melaksanakan pemilihan pimpinan Pansus, bertempat di Ruang Komisi D. Dan Rapat Paripurna saya skors selama 15 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Rapat Dewan yang berbahagia,

Sehubungan dengan acara pemilihan pimpinan Pansus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang telah selesai maka skors saya cabut dan tepat pukul 12.38 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(Ketuk palu 3 kali)

Kita lanjutkan acara yaitu Persetujuan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan hasil pemilihan pimpinan Panitia Khusus yang dilaporkan kepada saya, maka dapat saya umumkan disini hasil pemilihan pimpinan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang adalah sebagai berikut :

K e t u a : Puji Santoso, SP. MH
Wakil Ketua : Muhammad Asnawi, S.Pdi

"Apakah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang terpilih dapat disetujui ?"

====== *Setujuuu* ! ! !=======

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Tahapan demi tahapan dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini telah kita lalui, maka selesailah sudah Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap "***Alhamdulillahirobbil 'alamin*** " tepat pukul 12. 45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,	SEKRETARIS,
H. MAJID KAMIL MZ	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
LAMPIRAN II	:	Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang ;
LAMPIRAN III	:	Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dalam membahas Pelabuhan Tanjung Bonang;
LAMPIRAN IV	:	Berita Acara Nomor 170/ 226/ 2015 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dalam membahas Pelabuhan Tanjung Bonang;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI KOMISI ATAS LKPJ AHKIR T.A 2014 DAN LKPJ AHKIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : SELASA, 21 APRIL 2015

PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA

H. MAJID KAMIL MZ

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2014 DAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rekomendasi atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya sebagai berikut :

I. Pelaksanaan :

1. Hari : Rabu s/d Jum'at
2. Tanggal : 15 s/d 17 April 2015
3. Tempat : Ruang Komisi A
4. Dihadiri : Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 10 orang
5. Pimpinan Rapat : ILYAS/ Ketua Komisi A

II. Hasil Rapat

Komisi A DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan sebagai berikut :

- Guna meningkatkan pelayanan kepada publik, hendaknya pelayanan pembuatan KTP & KK agar diupayakan semaksimal mungkin..

Demikian Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang, 17 April 2015

KOMISI A
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua	Sekretaris
ILYAS	**MOHAMMAD ANSHORI**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI B LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MENYUSUN LAPORAN REKOMENDASI ATAS LKPJ AHKIR TAHUN 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Ahkir Tahun Anggaran 2014, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

PELAKSANAAN :

a. Jenis rapat	: Rapat kerja Komisi B		
b. Tentang	: Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014		
c. Hari	: Rabu s/d Senin		
d. Tanggal :	: 15 s/d 20 April 2015		
e. Waktu	: 10.00 WIB s/d selesai		
f. Tempat	: Ruang Komisi B		
g. Di hadiri oleh	: Pimpinan dan Anggota Komisi B		
h. Pimpinan Rapat	: H.HARNO,SE		
i. Anggota Kom B	: HERI KURNIAWAN,SE	MOHAMMAD ASNAWI,SPdi	
	ALI IRCHAM,ST	H.YUDIANTO,SH	
	SULISTYO WETI ARIANI	SAHNINGSIH,SE	
	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	H.JOKO SUPRIHADI,SH	
	DONNY KURNIAWAN,SE	H.NUR HASYIM	

B. HASIL RAPAT

Setelah mendalami dan mempelajari LKPJ Tahun Anggaran 2014, Komisi D DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Terkait dengan anggaran DAK yang ada di Dinas Pendidikan yang selalu mengalami permasalahan dalam proses pencairannya mulai dari tahun 2012 khususnya DAK untuk media pembelajaran diharapkan Pemerintah Daerah untuk segera mencari solusinya agar kegiatan dapat dilaksananakan dengan baik.

b. Bidang Kesehatan

1. Agar pemerintah daerah memperbanyak Puskesmas yang representatif, sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Agar pemerintah daerah senatiasa melakukan validasi data terkait program JKRS dan Jamkesmas agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran.
3. Untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap mutu pelayanan RSUD dr. R Soetrasno Rembang dimohon RSUD dr. R. Soetrasno lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu obat, sehingga pasien merasa puas terhadap pelayanan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Mengawali laporan hari ini, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, marilah sejenak kita bertafakur seraya memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah memberikan kepada kita semua berbagai rohmah, nikmah dan hidayah serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa (Amiin ya robbal alamin).

Selanjutnya Komisi D DPRD Kabupaten Rembang akan melaporkan hasil rapat sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN :

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah
2. Hari / Tanggal : Rabu s/d Senin, 15 s/d 20 April 2015
3. Tempat : Ruang Komisi D
4. Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi D
5. Pimpinan Rapat : Henry Purwoko, S.Pd (Ketua Komisi D)

HASIL RAPAT dan REKOMENDASI :

A. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Setelah mengadakan kajian monitoring dan evaluasi terkait bidang perikanan dan kelautan yang menjadi kebanggaan masyarakat Rembang pesisir pada khususnya. Hendaknya Pemkab Rembang harus segera :

1. Membangun dermaga kapal untuk menambatkan kapal-kapal di TPI Pandangan beserta infra struktur bangunanya.
2. Mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan untuk bekerja lebih keras lagi / dan optimalisasi kinerja guna mengintensifikasi pendapatan yang meningkat/maksimal.

B. DINAS INDAGKOP DAN UMKM

1. Mendesak kepada Pemkab Rembang agar segera membangun ulang pasar Pandangan Kecamatan Kragan yang terkena musibah kebakaran. Agar para pedagang tidak resah dan bisa beraktifitas normal kembali.
2. Agar Pemkab Rembang juga segera merencanakan membangun atau bahkan memindah pasar hewan di Kecamatan Pamotan yang pada saat ini dirasa menggangu aktifitas transportasi lalulintas kendaraan.
3. Bidang usaha kecil menenggah dan usaha mikro. Setelah mendengar, mengevaluasi serta mengkaji dari laporan kepala Dinas Indagkop & UMKM, Khususnya pengembangan usaha dari tahun ke tahun ada kenaikan barang-barang yang bisa di eksport ke Luar Negeri. Agar Pemkab Rembang untuk mendorong, membina dan mensuport anggaran guna terciptanya produk – produk lokal yang berkualitas tinggi antara lain : batik Lasem, Krudung bordir Sedan, dan pengrajin- pengrajin lainya untuk bisa eksis, mandiri bahkan ekspor ke luar Negeri.

C. DINAS ESDM

Terkait mengenai sumber daya energy dan mineral, Komisi B merekomendasikan :

1. Agar Pemkab dalam hal ini Dinas ESDM membuka dan membuat jarinagan distribusi gas yang seluas-luasnya untuk elpiji Tabung. Agar tak terjadi lagi kelangkaan gas melon/gas Elpiji ukuran 3 Kg yang sempat merisaukan masyarakat.
2. Agar Pemkab Rembang membuat dan menambah jaringan aliran listrik pada desa-desa kecil, dukuh atau pemukiman dan desa terpencil untuk mendapatkan hak atau pelayanan yang sama dan setara sehingga bisa ikut dan menikmati dan merasakan energi listrik Negara.

D. BKP DAN P4K

Sesuai visi dan misi Sdr Bupati agar masyarakat Rembang bebas dari kelaparan apalagi kekurangan pangan, maka Pemkab Rembang harus selalu mendorong Badan Ketahanan pangan untuk bisa menyiapkan cadangan pangan sebagai bahan persediaan pangan atau lumbung Pangan.

E. DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Untuk meningkatkan produktifitas pangan di bidang pertanian, komisi B merekomendasikan :

1. Agar Pemkab Rembang menambah dan menyiapkan tenaga penyuluh yang berkompeten dibidangnya.
2. Dalam rangka menyejahterakan dan meningkatkan pendapatan di bidang pertanian , maka Pemkab Rembang dalam hal ini Dinas Pertanian supaya menambah beberapa embung di seluruh wilayah pertanian di kabuapaten Rembang.

PENUTUP

Demikian hasil laporan pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang terkait LKPJ ahkir tahun Anggaran 2014 dan LKPJ AMJ Tahun 2015 yang dapat kami sampaikan. Ahkirnya, kepada para ketua, Wakil ketua, dan segenap anggota Dewan yang telah mengikuti secara seksama, kami ucapkan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf ,

WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

REMBANG, 20 April 2015

KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H.HARNO,SE

Sekretaris,

ALI IRCHAM , ST

LAPORAN HASIL PENYUSUNAN

REKOMENDASI KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI REMBANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN

LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

KOMISI : C

A. Pelaksanaan :

1. Dasar	:	Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang tanggal 14 April 2015
2. Hari/ Tanggal	:	Rabu s/d Senin 15 s/d 20 April 2015
3. Tempat	:	Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Rembang
4. Hadir dalam Rapat	:	- Pimpinan dan anggota Komisi C : 9 orang
5. Pimpinan Rapat	:	WIDODO

B. Hasil Rapat :

Secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 dapat dipahami, namun perlu direkomendasi sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan sampai dengan proses penganggaran harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
2. Perlu kejelasan terkait kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang antara Badan Pertanahan, Bappeda dan DPU di tingkat Kabupaten.
3. Perencanaan pembangunan dengan realisasi kegiatan harus disinkronkan, agar menghasilkan arah pembangunan yang sesuai dengan rencana yang dicapai.
4. Perencana pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum harus ditunjuk personil yang betul- betul menjiwai seorang perencana sehingga bisa menghasilkan program yang tepat guna dan multi guna.
5. Infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Rembang s/d tahun 2014 belum semuanya bagus (mulus) seperti yang dituangkan didalam Visi dan Misi Bupati Rembang pada RPJMD.
6. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan kualitas jalan antar Kecamatan dan jalan poros desa menjadi mulus (berhotmix / beton) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
7. Pada Dinas Pekerjaan Umum perlu pengadaan Alat Uji Tes Beton untuk menguji ketebalan beton jalan.
8. Paket- paket pekerjaan yang ada di DPU yang sudah *overload* agar dipadatkan volume paketnya karena keterbatasan personil di DPU.
9. Diharapkan pada Bidang Sumber Daya Air supaya direncanakan program terobosan yang sesuai dengan situasi Kabupaten Rembang yang tadah hujan dan sangat terbatas

4. Semakin meningkatnya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Rembang Komisi D merekomendasikan agar RSUD dr. R. Soetrasno untuk menyediakan fasilitas khusus untuk penderita HIV/AIDS dan penyediaan obat khusus untuk penderita HIV/AIDS.

c. Bidang Pariwisata

1. Banyaknya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang yang masih belum dikembangkan diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi wisata, sehingga dapat meningkat industri pariwisata yang ada di Rembang dan berdampak pula pada peningkatan PAD pada sektor pariwisata.
2. Agar pemerintah daerah mengevaluasi sistem promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang baik promosi yang berskala Nasional maupun promosi yang berskala internasional, dan mencari terobosan untuk mengangkat pariwisata Kabupaten Rembang, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wiasatawan domestik maupun mancanegara.
3. Diharapkan pemerintah daerah memberi ruang kepada generasi muda untuk membuka industri kreatif.
4. Untuk meningkatkan prestasi di bidang olah raga sampai tingkat Nasional agar pemerintah daerah meningkatkan fasilitas olah raga dan menghidupkan olah raga yang ada tingkat di Kecamatan, sehingga akan memunculkan bibit-bibit atlet yang berprestasi.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Setelah dihentikannya program PNPM oleh pemerintah pusat, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan asset PNPM yang ada di masyarakat, dimohon agar pemerintah daerah mengupayakan payung hukum yang mengatur tentang organisasi (BKAD dan UPK) dan pengelolaan aset PNPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

1. Semakin meningkatnya investasi yang ada di Kabupaten Rembang yang bisa dilihat dari makin banyak perusahaan-perusahaan, agar pemerintah daerah dapat menggali potensi CSR dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di lokasi sekitarnya.
2. Diharapkan pemerintah daerah memperbanyak pelatihan kerja khususnya kepada kaum muda, sehingga apabila ada permintaan tenaga kerja dari perusahaan dapat menyediakan tenaga kerja yang siap pakai.
3. Melalui dinas sosial agar pemerintah daerah melakukan pendataan orang miskin secara valid dan lebih cermat, sehingga setiap ada program yang berkaitan dengan masalah sosial dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

f. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

1. Agar pemerintah daerah mengkaji secara mendalam terkait dengan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat menambah khasanah budaya Kabupaten Rembang.
2. Agar semua SKPD dapat berkoordinasi terkait tentang kearsipan, sehingga arsip-arsip yang penting dapat disimpan digedung arsip daerah.
3. Diharapkan pemerintah daerah memberikan fasilitas perpustakaan yang memadai baik di Kecamatan maupun di desa, sehingga dapat meningkatkan budaya baca pada masyarakat.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rapat Komisi D DPRD Kabupaten dalam menyusun rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014.

Rembang, 20 April 2015

KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
HENRY PURWOKO, S.Pd	**ISLAHUDDIN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS PELABUHAN TANJUNG BONANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu ditetapakan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :

1 Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2015.
2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 April 2015.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang tanggal 21 April 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Pelabuhan Tanjung Bonang.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Pelabuhan Tanjung Bonang.

KEEMPAT : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g
pada tanggal : 21 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K e t u a,

H.MAJID KAMIL.MZ

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :

1 Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2015.
2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 April 2015.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang tanggal 21 April 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Pelabuhan Tanjung Bonang.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Pelabuhan Tanjung Bonang.

KEEMPAT : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g
pada tanggal : 21 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K e t u a,

H.MAJID KAMIL.MZ

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 21 April 2015
Nomor : 4 Tahun 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO,SP.,M.H.	KETUA	
2.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.i	WK. KETUA	
3.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
4.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
5.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
6.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
7.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	ANGGOTA	
8.	Ir. H. SUNARTO	ANGGOTA	
9.	H. HARNO	ANGGOTA	
10.	EDI KARTONO, SPd.,H.M.	ANGGOTA	
11.	ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
12.	ILYAS	ANGGOTA	
13.	WASIMAN	ANGGOTA	
14.	JASMANI	ANGGOTA	
15.	WIDODO	ANGGOTA	
16.	DONNY KURNIAWAN, SE., M.M.	ANGGOTA	
17.	ALI IRCHAM, S.T.	ANGGOTA	
18.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
19.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
20.	GATOT PAERAN,S.H.,Msi	ANGGOTA	
21.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	
22.	H. YUDIYANTO,S.H.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K e t u a,

H.MAJID KAMIL.MZ

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 21 April 2015
Nomor : 4 Tahun 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO,SP.,M.H.	KETUA	
2.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.i	WK. KETUA	
3.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
4.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
5.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
6.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
7.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	ANGGOTA	
8.	Ir. H. SUNARTO	ANGGOTA	
9.	H. HARNO	ANGGOTA	
10.	EDI KARTONO, SPd.,H.M.	ANGGOTA	
11.	ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
12.	ILYAS	ANGGOTA	
13.	WASIMAN	ANGGOTA	
14.	JASMANI	ANGGOTA	
15.	WIDODO	ANGGOTA	
16.	DONNY KURNIAWAN, SE., M.M.	ANGGOTA	
17.	ALI IRCHAM, S.T.	ANGGOTA	
18.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
19.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
20.	GATOT PAERAN,S.H.,Msi	ANGGOTA	
21.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	
22.	H. YUDIYANTO,S.H.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K e t u a,

H.MAJID KAMIL.MZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS

MEMBAHAS PELABUHAN TANJUNG BONANG

NOMOR : 170 / 226 / 2015

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu lima belas bertempat di ruang Komisi D dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang.

Rapat dihadiri oleh 18 (DELAPAN BELAS) orang dari 22 (dua puluh dua) orang anggota Panitia Khusus, dan keputusan rapat menetapkan Pimpinan Panitia Khusus membahas Pelabuhan Tanjung Bonang adalah sebagai berikut :

Ketua : PUJI SANTOSO, SP, MH.
Wakil Ketua : MASNAWI, SPdi

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

(SUGIHARTO)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

Hari : RABU
Tanggal : 22 April 2015
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang ;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. MAJID KAMIL MZ**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 30 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 15 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	BupatiRembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Instansi, Kantor, Bagiandan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan lainnya yang berbahagia.

Puji dan syukur Alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkankehadirat Allah SWTyang telah memberikan limpahan taufiq, hidayah daninayah kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahasLKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang dengan agenda utama **Pembacaan Keputusan DPRD Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang**. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada saudara-saudara yang dapat hadir dalam rapat paripurna ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan dari Sekretariat DPRD, bahwa jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar

hadir adalah sebanyak 30 orang. Adapun sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembangbahwa Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Dengan demikian rapat paripurna tidak disyaratkan harus memenuhi kuorum dan dapat kita mulai tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota.

Dengan mengucap ***"Bismillaahirrohmaanirrohiim"*** tepat pukul 11.20 WIB Rapat Paripurna Istimewa hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum kitalanjutkanacara, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna istimewa hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Keputusan DPRD Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;
3. Penutup.

Selanjutnyamarilah kita masuki acara yang kedua, dan merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu **Pembacaan Keputusan DPRD Atas LKPJ Akhir TahunAnggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang.**

Kepada Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dipersilahkan untuk membacakannya.

====PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ AKHIRT.A 2014 DAN LKPJ AMJ BUPATI REMBANG =====

- ***(Keputusan DPRD atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang terlampir)***

Terima kasih Sdr. Drs. ACHMAD MUALIF atas pembacaannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah kita mendengarpembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembangyang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, maka dapat diketahui bahwa terdapatbeberapa masukan, himbauan, saran maupun koreksi yang merupakan Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Semua ini dikandung maksud, agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rembang kedepan, akan menjadi lebih baik sesuai dengan perencanaan dan harapan masyarakat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah dibacakannya Keputusan DPRD Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang, maka selesailah acara Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini, terima kasih atas

perhatiannya dan mohon maaf atas segalakekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap *"Alhamdulillahirobbil 'alamin "* tepat pukul 11.40 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,	SEKRETARIS,
H. MAJID KAMIL MZ	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
LAMPIRAN II	:	Keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 dan (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI KOMISI ATAS LKPJ AHKIR T.A 2014
DAN LKPJ AHKIR MASA JABATAN BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : RABU ., 22 APRIL 2015

PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DRRD KABUPATEN REMBANG
KETUA ,

H. MAHMUD KAMIL MZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI KOMISI ATAS LKPJ AHKIR T.A 2014
DAN LKPJ AMJ BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : RABU , 22 APRIL 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. .....
2	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	2. .....
3	.....	Pengadilan Negeri Rembang	3. .....
4	.....	Dandim 0720 Rembang	4. .....
5	kp. yayat Syafi'i H	Kepolisian Resort Rembang	5. .....
6	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6. .....
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. .....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI KOMISI ATAS LKPJ AHKIR T.A 2014
DAN LKPJ AMJ BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : RABU , 22 APRIL 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI	Wartono.	SAB.	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. LAWANJ.	As. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akh samadi	Kabag	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Yoheta NW	Kabag Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sukamdar	Kabag	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Pri Hr Yat	Kabag	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Ind Sukawati	Kabag	15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT	Kusumo Endro		18
19	BAPPEDA	HARIS		19
20	BPMPKB	Dwi Wahyuni H	Ka.	20
21	B K D	Susr Chandrawati		21
22	BKP & P4K			22
23	B P B D	Anjar	Bpn	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Dinkes	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Wmaryu K	Dinpendik	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Suratmin		28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO			30
31	DINAS DUKCAPIL	SOEPRIYARSONO		31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO	KADIS	32
33	DINBUDPARPORA	SUNARTO	Ka	33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryoso	Sekretaris	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rustiyanto	Sekr	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka.	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi Winarno	Ka	37
38	KANTOR PPT	Abdul Rozak	Kasie	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	dr. Agus [illegible]	[illegible]	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	Darmaningsih		41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sihombing	Ka Unit	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	SUMITRO	Kasi	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN	ISMARTOYO	Ka. Hama	54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK	[illegible]	Kepala	62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG	Maslichan.	Dosen 3	74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		D Wardana	TA FKS	95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI KOMISI ATAS LKPJ AHKIR T.A 2014

DAN LKPJ AMJ BUPATI REMBANG

HARI/TANGGAL : RABU , 22 APRIL 2015

PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	.....	1
2	CAMAT KALIORI	.....	2
3	CAMAT SUMBER	.....	3
4	CAMAT SULANG	.....	4
5	CAMAT BULU	.....	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM	.....	7
8	CAMAT SALE	.....	8
9	CAMAT LASEM	.....	9
10	CAMAT PANCUR	.....	10
11	CAMAT SEDAN	.....	11
12	CAMAT SLUKE	.....	12
13	CAMAT KRAGAN	.....	13
14	CAMAT SARANG	.....	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 KodePos59212
R E M B A N G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2010-2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2010-2015 yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri sipil;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

18. Peaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;

29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Intern Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2010-2015 pada tanggal 22 April 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2010-2015 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk ditindaklanjuti.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K E T U A,

H.MAJID KAMIL.MZ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN REMBANG
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal : 22 April 2015

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2010-2015

Berdasarkan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2014 dan AMJ Bupati Rembang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 14 April 2015 dan rapat-rapat pembahasan internal yang dilakukan, DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi – rekomendasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Rembang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan agar lebih baik , sebagai berikut :

I. BIDANG PENDIDIKAN

Terkait dengan anggaran DAK yang ada di Dinas Pendidikan yang selalu mengalami permasalahan dalam proses pencairannya mulai dari tahun 2012 khususnya DAK untuk media pembelajaran diharapkan Pemerintah Daerah untuk segera mencari solusinya agar kegiatan dapat dilaksananakan dengan baik.

II. BIDANG KESEHATAN

1. Agar pemerintah daerah memperbanyak Puskesmas yang representatif, sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Agar pemerintah daerah senatiasa melakukan validasi data terkait program JKRS dan Jamkesmas agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran.
3. Untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap mutu pelayanan RSUD dr. R Soetrasno Rembang dimohon RSUD dr. R. Soetrasno lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu obat, sehingga pasien merasa puas terhadap pelayanan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
4. Melihat semakin meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Rembang agar RSUD dr. R. Soetrasno menyediakan fasilitas khusus untuk penderita HIV/AIDS dan penyediaan obat khusus untuk penderita HIV/AIDS.

III. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

1. Pemkab perlu memperjelas terkait kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang antara Badan Pertanahan, Bappeda dan DPU di tingkat Kabupaten.
2. Ruang terbuka hijau yang diharapkan 30% belum terpenuhi, untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyediakan anggaran dan lahannya.
3. Pembebasan lahan untuk Embung Kaliombo agar segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, karena anggaran pembangunannya sudah tersedia dari dana APBN.

IV. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Perencana pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum harus ditunjuk personil yang betul- betul menjiwai seorang perencana sehingga bisa menghasilkan program yang tepat guna dan multi guna.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta kualitas jalan antar Kecamatan dan jalan poros desa menjadi mulus (berhotmix / beton) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah seperti yang dituangkan didalam Visi dan Misi Bupati Rembang pada RPJMD.
3. Pada Dinas Pekerjaan Umum perlu pengadaan Alat Uji Tes Beton untuk menguji kualitas dan ketebalan beton jalan.
4. Paket- paket pekerjaan yang ada di DPU yang dirasa sudah *overload* dibandingkan dengan jumlah personil yang menangani agar dipadatkan volume paketnya sehingga dapat membantu keterbatasan personil di DPU.
5. Diharapkan pada Bidang Sumber Daya Air supaya direncanakan program terobosan yang sesuai dengan situasi Kabupaten Rembang yang tadah hujan dan sangat terbatas curah hujannya (misalnya membuat lebih banyak cek dam/ bendung kecil didaerah aliran sungai sebanyak mungkin).
6. Pembebasan lahan untuk Embung Kaliombo agar segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, karena anggaran pembangunannya sudah tersedia dari dana APBN.
7. Perlu adanya penambahan armada truck sampah untuk kelancaran pengangkutan sampah.

8. Honor Tenaga Harian Lepas di DPU (Bidang Persampahan) agar ditingkatkan, supaya semangat kerja dan kesejahteraan pada Tenaga Harian Lepas tersebut meningkat.
9. Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Persampahan dan Gorong-Gorong pada Dinas Pekerjaan Umum agar dijadikan satu Dinas tersendiri karena beban pekerjaan yang sangat besar dan keterbatasan jumlah pegawai, sehingga masing- masing dapat bekerja lebih maksimal.

V. BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

1. Semakin meningkatnya investasi yang ada di Kabupaten Rembang yang terlihat dari makin banyak perusahaan, agar pemerintah daerah dapat menggali potensi CSR dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di lokasi sekitarnya.
2. Diharapkan pemerintah daerah memperbanyak pelatihan kerja khususnya kepada kaum muda, sehingga apabila ada permintaan tenaga kerja dari perusahaan dapat menyediakan tenaga kerja yang siap pakai.
3. Melalui dinas sosial agar pemerintah daerah melakukan pendataan orang miskin secara valid dan lebih cermat, sehingga setiap ada program yang berkaitan dengan masalah sosial dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

VI. BIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN , KOPERASI DAN UMKM

1. Mendesak kepada Pemkab Rembang agar segera membangun ulang pasar Pandangan Kecamatan Kragan yang terkena musibah kebakaran. Agar para pedagang tidak resah dan bisa beraktifitas normal kembali.
2. Agar Pemkab Rembang juga segera merencanakan membangun atau bahkan memindah pasar hewan di Kecamatan Pamotan yang pada saat ini dirasa menggangu aktifitas transportasi lalulintas kendaraan.
3. Agar Pemkab Rembang dapat mendorong, membina dan mensuport anggaran guna terciptanya produk – produk lokal yang berkualitas tinggi antara lain : batik Lasem, Krudung bordir Sedan, dan pengrajin- pengrajin lainya untuk bisa eksis, mandiri bahkan ekspor ke luar Negeri.

VII. BIDANG PARIWISATA

1. Banyaknya potensi pariwisata di Kabupaten Rembang yang masih belum dikembangkan diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi wisata, sehingga dapat meningkat industri pariwisata yang ada di Rembang yang akhirnya berdampak pula pada peningkatan PAD pada sektor pariwisata.
2. Agar pemerintah daerah mengevaluasi sistem promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang baik promosi yang berskala Nasional maupun promosi yang berskala internasional, dan mencari terobosan untuk mengangkat pariwisata Kabupaten Rembang, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wiasatawan domestik maupun mancanegara.
3. Diharapkan pemerintah daerah memberi ruang kepada generasi muda untuk membuka industri kreatif.
4. Untuk meningkatkan prestasi di bidang olah raga sampai tingkat Nasional agar pemerintah daerah meningkatkan fasilitas olah raga dan menghidupkan olah raga yang ada tingkat di Kecamatan, sehingga akan memunculkan bibit-bibit atlet yang berprestasi.

VIII. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Agar dibangun dermaga kapal untuk menambatkan kapal-kapal di TPI Pandangan beserta infra struktur bangunanya.
2. Mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan untuk bekerja lebih keras lagi / dan optimalisasi kinerja guna mengintensifikasi pendapatan yang meningkat/maksimal.

IX. BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

1. Agar Pemkab dalam hal ini Dinas ESDM membuka dan membuat jarinagan distribusi gas yang seluas-luasnya untuk elpiji Tabung, sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan gas melon/gas Elpiji ukuran 3 Kg yang sempat merisaukan masyarakat.
2. Agar Pemkab Rembang membuat dan menambah jaringan aliran listrik pada desa-desa kecil, dukuh atau pemukiman dan desa terpencil untuk mendapatkan hak atau pelayanan yang sama dan setara sehingga bisa ikut dan menikmati dan merasakan energi listrik Negara.

X. BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN

1. Agar Pemkab Rembang menambah dan menyiapkan tenaga penyuluh yang berkompeten di bidangnya.

2. Dalam rangka menyejahterakan masyarakat sekaligus meningkatkan produktifitas di bidang pertanian , maka Pemkab Rembang dalam hal ini Dinas Pertanian supaya menambah beberapa embung di seluruh wilayah pertanian di kabupaten Rembang.

XI. BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN P4K

Sesuai visi dan misi Sdr Bupati agar masyarakat Rembang bebas dari kelaparan apalagi kekurangan pangan, maka Pemkab Rembang harus selalu mendorong Badan Ketahanan pangan untuk bisa menyiapkan cadangan pangan sebagai bahan persediaan pangan atau lumbung Pangan.

XII. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB.

Setelah dihentikannya program PNPM oleh pemerintah pusat, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan asset PNPM yang ada di masyarakat, dimohon agar pemerintah daerah mengupayakan payung hukum yang mengatur tentang organisasi (BKAD dan UPK) dan pengelolaan aset PNPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIII. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Guna meningkatkan pelayanan kepada publik, hendaknya pelayanan pembuatan KTP & KK agar diupayakan semaksimal mungkin.

XIV. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tahapan perencanaan sampai dengan proses penganggaran harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
2. Perencanaan pembangunan dengan realisasi kegiatan harus disinkronkan, agar menghasilkan arah pembangunan yang sesuai dengan rencana yang dicapai.

XV. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Untuk mempercepat penanganan kebakaran diseluruh wilayah Kabupaten Rembang agar mobil pemadam kebakaran, personil dan beserta peralatannya ditambah dan ditempatkan di tiga wilayah Kabupaten Rembang (barat, tengah dan timur).

2. Untuk mempermudah kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka penanganan kebakaran yang semula berada di Dinas Pekerjaan Umum agar dimasukkan menjadi tugas BPBD dengan mengubah Perda SOTK.

XVI. BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Agar pemerintah daerah mengkaji secara mendalam terkait dengan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat menambah khasanah budaya Kabupaten Rembang.
2. Agar semua SKPD dapat berkoordinasi terkait tentang kearsipan, sehingga arsip-arsip yang penting dapat disimpan digedung arsip daerah.
3. Diharapkan pemerintah daerah memberikan fasilitas perpustakaan yang memadai baik di Kecamatan maupun di desa, sehingga dapat meningkatkan budaya baca pada masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ